KHILAFAH DAN TERORISME

Pemikiran Islam Kebangsaan Kyai NU

Buku ini secara khusus menyajikan bahasan tentang ketidaksetujuan kyai NU dalam menolak penegakkan sistem khilafah yang hendak ditegakkan sebagian kelompok Islam di Indonesia. Bagi mereka, khilafah bukan saja merupakan sesuatu yang ahistoris, tetapi juga tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan demokrasi yang memposisikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Alasan mereka menolak sistem khilafah didasarkan kepada argumentasi bahwa Pancasila dan NKRI adalah konsensus bangsa yang bersifat final. Upaya lain di luar konsensus yang bermaksud merubah sistem tersebut dianggap akan mencederai semangat kemerdekaan yang diproklamirkan pada tahun 1945. Selain karena faktor sejarah, argumen menolak penegakkan sistem khilafah juga didasarkan kepada ajaran agama yang mereka pahami. Apa yang penting dalam kepemimpinan bukanlah terletak pada kesatuan politik di bawah kendali seorang khalifah, tetapi yang wajib diperjuangkan ialah terwujudnya persudaraan sesama muslim dan keadilan bagi sesama manusia.

IAIN JEMBER PRESS
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember 66136
Telp. 0331-487550 Fax. 0331-427005
email: iainjember.press14@gmail.com

Dr. Ahidul Asror, M.Ag
KHILAFAH & TERORISME PEMIKIRAN ISLAM KEBANGSAAN KYAI NU

Dr. Ahidul Asror, M.Ag

KHILAFAH DAN TERORISME

Pemikiran Islam Kebangsaan Kyai NU

KHILAFAH DAN TERORISME

Pemikiran Islam Kebangsaan Kyai NU

Dr. Ahidul Asror, M.Ag

KHILAFAH DAN TERORISME

Pemikiran Islam Kebangsaan Kyai NU

KHILAFAH DAN TERORISME
Pemikiran Islam Kebangsaan Kyai NU

Penulis:
Dr. Ahidul Asror, M.Ag

Editor:
Drs. Ainur Rafik, M.Ag

Layout:
Imam Ashari

Cetakan I:
OKTOBER 2015

Foto Cover:
Internet

Penerbit:
IAIN Jember Press
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Tlp. 0331-487550 Fax. 0331-427005
e-mail: iainjember.press14@gmail.com

ISBN: 978-602-414-068-7

Isi diluar tanggung jawab penerbit

B

PENGANTAR PENULIS

Transisi demokrasi yang bergulir sejak berakhirnya masa pemerintahan Ode Baru ditandai dengan lahirnya beragam fenomena. Dalam dunia akademik berkembang pula beragam wacana, salah satunya tentang pemikiran Islam-kebangsaan kontemporer yang berkembang di kalangan kyai NU, yakni pemikiran tentang sistem khilafah dan terorisme. Wacana khilafah dan terorisme di kalangan kyai NU berkembang sebagai jawaban mereka atas upaya sebagian kelompok Islam di Indonesia yang hendak menegakkan sistem khilafah serta munculnya gerakan teroris yang dalam beberapa waktu terakhir menggejala di bumi Nusantara. Pemikiran kyai NU itu jika dicermati mempunyai hubungan dengan diskursus yang dikembangkan Esposito dan Piscatori tentang hubungan "Islam dan Demokrasi", yang memunculkan beragam aliran, yaitu mereka yang menerima penuh bahwa demokrasi identik dengan Islam, mereka yang me-

nyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam meski tetap mengakui adanya perbedaan di antara keduanya, dan mereka yang menolak sama sekali sistem demokrasi. Kyai dan ormas NU sendiri dikenal lebih menerima sistem demokrasi, sebagaimana ditunjukkan dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Buku ini secara khusus menyajikan bahasan tentang ketidaksetujuan kyai NU dalam menolak penegakkan sistem khilafah yang hendak ditegakkan sebagian kelompok Islam di Indonesia. Bagi mereka, khilafah bukan saja merupakan sesuatu yang ahistoris, tetapi juga tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan demokrasi yang memposisikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Alasan mereka menolak sistem khilafah didasarkan kepada argumentasi bahwa Pancasila dan NKRI adalah konsensus bangsa yang bersifat final. Upaya lain di luar konsensus yang bermaksud merubah sistem tersebut dianggap akan mencederai semangat kemerdekaan yang diproklamirkan pada tahun 1945. Selain karena faktor sejarah, argumen menolak penegakkan sistem khilafah juga didasarkan kepada ajaran agama yang mereka pahami. Apa yang penting dalam kepemimpinan bukanlah terletak pada kesatuan politik di bawah kendali seorang khalifah, tetapi yang wajib diperjuangkan ialah terwujudnya persudaraan sesama muslim dan keadilan bagi sesama manusia.

Selain itu, buku ini juga memaparkan pandangan kyai NU dalam menolak setiap bentuk radikalisasi agama yang

dilakukan sebagian kalangan Islam garis keras dalam menyebarkan Islam. Ajaran Islam yang didakwahkan secara radikal dengan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat lokal menurut pandangan para kyai NU akan melahirkan wajah Islam yang kaku. Dengan kata lain, pola dakwah yang dikembangkan kalangan Islam radikal dinilai sebagai ketidaktepatan sebuah garis perjuangan. Para kyai NU dalam hal ini lebih menawarkan model dakwah yang pernah dilakukan wali songo di pulau Jawa, karena keberhasilan mereka menyebarluaskan Islam di wilayah Nusantara dengan sikap penuh keramahan, toleransi, dan mempertimbangkan berbagai tradisi yang berkembang pada masyarakat lokal.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku tipis yang ada di hadapan pembaca ini jauh kata sempurna. Kritik dan saran sangat penulis harapkan datang dari segenap pembaca. *Allah A'lam bi al-Shawab*.

Jember, Agustus 2015

Penulis

B

PENGANTAR REKTOR IAIN JEMBER

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Memberi atas segala limpahan nikmat, karunia dan anu-gerah pengetahuan kepada hamba-Nya, sehingga program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) periode tahun ketiga, 2015 dapat berjalan sesuai rencana. Sholawat serta salam se-moga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang telah mengarahkan umat manusia kepada jalan yang benar melalui agama Islam.

Program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) ini ter-lahir dari semangat untuk menumbuhkan atmosfir akade-mik di kala-ngan civitas akademika, termasuk tenaga ke-pendidikan. Dan program GELARKU periode 2015 ini me-rupakan program periode ketiga sejak dicanangkan sebagai

program unggulan tahun 2013. Karenanya, GELARKU merupakan program yang dimaksudkan untuk memberikan target yang jelas terhadap karya akademik yang dapat dihasilkan warga kampus. Hal ini sekaligus mendorong semua warga kampus untuk terus berkarya. Setidaknya, program ini sebagai rangkaian dari program yang sudah dicanangkan, yakni "Doktorisasi di Kampus Santri", seba-gai salah satu ukuran bahwa di masa kepemimpinan kami tidak ada lagi dosen yang bergelar magister.

Boleh dikatakan, berbagai program itu diakselerasikan de-ngan kekuatan sumber daya manusia yang tersedia di kampus yang memang sudah menyandang "alih status" dari STAIN Jem-ber menjadi IAIN Jember. Sehingga tidak berlebihan, jika IAIN Jember sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Islam Negeri di wilayah Tapal Kuda bukan sekedar lembaga pelayanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. IAIN Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislaman, selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi civitas akademikanya.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan program GELAR-KU ini sebagai pintu lahirnya kreatifitas yang tiada henti dalam melahirkan gagasan, pemikiran, ide-ide segar dan mencerdas-kan untuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa. Siapapun, anak bang-

sa memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menata bangunan intelektual melalui karya-karya besar dari kampus Mangli ini.

Setidaknya, terdapat dua parameter untuk menilai kualitas karya akademik. *Pertama,* produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan latar belakang kompetensi keilmuan yang dimiliki. *Kedua,* apakah karya-karya tersebut mampu memberi pencerahan kepada publik, yang memuat ide ener-gik, konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya bagi civitas akademika maupun tenaga kependidikan merupakan sebuah keniscayaan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi positif kepada para dosen, mahasiswa, dan karyawan yang telah mencurahkan segala pikiran untuk menghasilkan karya buku dan kini diterbitkan oleh IAIN Jember Press. Salam hangat juga kepada warga "Kampus Mangli" yang merespon cepat program yang kami gulirkan, yakni GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) sebagai ikhtiar kami menciptakan iklim akademik, yakni menghasilkan karya dalam bentuk buku.

Karya buku ini akan terus berlangsung dan tidak boleh berhenti. Sebab, buku adalah "pintu ilmu" untuk membuka ger-bang peradaban bangsa. Buku adalah jembatan meluaskan pemahaman, mengkonstruksi pemikiran, dan menajamkan akal analisis terhadap beragam fenomena yang ada di sekitar hidup dan kehidupan kita.

Dan tentu saja, karya-karya yang ditulis oleh berbagai pihak diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan atau dunia akademik bersamaan dengan program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) periode ketiga yang dicanangkan IAIN Jember dalam tahun ini. Program GELARKU ini diorientasikan untuk meningkatkan iklim akademis di tengah-tengah tantangan besar tuntutan publik yang menginginkan "*referensi intelektual*" dalam menyikapi beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-masa mendatang.

Akhirnya, kami ucapkan selamat kepada para penulis buku yang ikut memperkaya GELARKU sebagai program intelektualitas. Dengan harapan, IAIN Jember makin dikenal luas, tidak ha-nya skala nasional, tetapi juga internasional. Dan, yang lebih penting, beraneka "warna pemikiran" yang terdokumentasi dalam buku ini menjadi referensi pembaca dalam memaknai setiap problematika kehidupan.

Jember, Medio Agustus 2015
Rektor IAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM

B

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak awal, Nahdatul Ulama (NU) dikenal sebagai organisasi sosial-kegamaan yang kiprahnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan kebangsaan. Keputusan menjadi partai politik di masa Orde Lama dan menerima Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam Anggaran Dasarnya di masa Orde Baru, merupakan sedikit bukti bahwa keberadaan NU tidak bisa dilepaskan dari persoalan kebangsaan.[1] Kontribusi tokoh NU dalam kehidupan berbangsa juga tidak bisa dipandang remeh. Terpilihnya tokoh sekaliber Abdurrahman

[1]Lihat tentang sejarah berdiri dan pertumbuhan NU dalam Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Cet. III (Solo: Duta Aksara Mulia, 2010). Lihat pula Mitsuo Nakamura, "Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 1980-an: Dari Muktamar Semarang 1979 Hingga Muktamar Situbondo 1984" dalam Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LkiS, 1997), 76-88.

Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI pada masa reformasi adalah bukti lain dari sekian banyak bukti keterlibatan kader-kader NU lainnya. Mozaik pemikiran Islam-kebangsaan Gus Dur sendiri telah dirilis dalam beberapa buku. Salah satunya berjudul "Islam Kosmopolitan". Diskursus pemikiran Islam-kebangsaan dalam buku ini oleh Gus Dur dijelaskan secara gamblang. Ia menekankan agar umat senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai universal agama, nasionalisme, dan menjunjung tinggi sikap keterbukaan akan segala kemungkinan menerima perbedaan. Sikap kenegarawanan Gus Dur tampak sekali dalam buku ini melalui gagasan-gagasan tentang perlunya memahami perbedaan.[2]

Berbagai diskursus yang mengemuka secara nasional setelah pecahnya masa reformasi juga tidak lepas dari perhatian tokoh-tokoh NU baik di pusat ataupun di daerah. Di pusat, tokoh-tokoh NU seperti Kyai Hasyim Muzadi, Kyai Said Aqil Sirodj,[3] dan Kyai Mustofa Bisri—dengan karakteristiknya masing-masing—menyedot perhatian publik karena pemikiran Islam-kebangsaan mereka yang sangat

---

[2] Baca pengantar oleh Agus Maftuh Abegebril, "Mazhab Islam Kosmopolitan Gus Dur", dalam Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), xii-xiii. Baca pula Ellyasa KH. Dharwis (ed) *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, dan Pustaka Pelajar, 1994).

[3]Lihat karya Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).

brilian. Diskursus pemikiran Islam-kebangsaan mereka antara lain ditunjukkan dengan kegigihan mereka mensosialisasikan pentingnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sedang terancam oleh gerakan separatis-kedaerahan. Publik juga mengetahui, diskursus pemikiran Islam-kebangsaan yang bergaung melalui pemikiran-pemikiran kalangan muda NU, seperti Ulil Abshar Abdalla dengan Jaringan Islam Liberal (JIL) nya,[4] atau Musda Mulia dengan *counter legal draft*-nya.[5] Kedua tokoh muda NU itu sama-sama *concern* memperjuangkan tentang kesetaraan, kebebasan, dan hak-hak masyarakat sipil di dalam demokrasi.[6]

Dengan membaca berbagai diskursus pemikiran sebagaimana tersebut di atas, menambah keinginan untuk memahami lebih mendalam tentang sikap dan pandangan

---

[4]Lihat tulisan-tulisan yang terangkum dalam Ulil Abshar Abdalla, *Menjadi Muslim Liberal* (Jakarta: Nalar, 2005). Lihat pula pandangan Ulil Abshar Abdalla, “Keragaman dalam Pandangan Islam,” dalam *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas* (Jakarta: Erlangga, 2003).

[5]Lihat Musda Mulia, *Counter Legal Draft*, Kompilasi Hukum Islam, Litbang Departemen Agama. Lihat pula tulisan Musda Mulia, “Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta” dalam Majalah Tabligh Muhammadiyah, Mei 2008.

[6]Periksa Komentar dan pandangan Kyai Muchith Muzadi, “Soal NII, Pemerintah Masih Ragu” diakses dari *http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,32403-lang,id-c,warta-t,Mbah+Muchit++Soal+NII++Pemerintah+Masih+Ragu-.phpx* (Mei 2013). Lihat pula pandangannya tentang terorisme, “Teroris Bukan Cuma Noordin” diakses dari *http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,18563-lang,id-c,warta-t,Mbah+Muchit++Teroris+Bukan+Cuma+Noordin-.phpx* (Mei 2013).

tokoh-tokoh NU lain tentang diskursus pemikiran Islam-kebangsaan. Di antara diskursus pemikiran Islam-kebangsaan yang kini terus menggelinding dalam wacana publik adalah tentang khilafah Islam dan terorisme, di mana para kyai NU Jember juga turut memberikan sumbangan pemikirannya, sebagaimana ditemukan dalam beberapa tulisan dan juga komentar mereka di berbagai media. Di antara kyai NU Jember yang hingga kini masih menjadi "teks hidup" dan menginspirasi bagi lahirnya pemikiran Islam-kebangsaan kontemporer tersebut adalah Kyai Muchith Muzadi (Mbah Muchith).[7] Selain ketokohan dan posisi kyai yang demikian sentral di tengah masyarakat, Mbah Muchit hingga kini dikenal sebagai sosok kyai NU Jember yang kapasitas intelektualnya menjadi referensi nasional untuk masalah Islam-kebangsaan.[8] Selain Mbah Muchit, di kalangan kyai muda NU Jember, juga ada nama Mohammad Idrus, salah seorang kyai yang terus menyuarakan bahaya radikalisme serta tulisannya yang kritis terhadap paham wahabi di Indonesia.[9]

---

[7]Pemikiran Islam-kebangsaan Kyai Muchith Muzadi, selain diskursus pemikiran tentang khilafah dan terorisme sudah pernah diteliti. Lihat misalnya, karya yang ditulis oleh Ayu Sutarto, "*Menjadi NU Menjadi Indonesia*" dan "*Indonesia di Mata Seorang Kyai NU*".

[8]Salah satu bentuk kepedulian Kyai Muchith Muzadi dalam memahami masalah-masalah ke-NU-an dapat dilihat dalam salah satu karyanya. Lihat Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual* (Yogyakarta: LKPSM NU, 1994).

[9]Lihat Muhammad Idrus, *Ahlussunah wal Jama'ah: Bekal Menghadapi Wahabi di Indonesia* dan *Anatomi Ahlusunnah wal Jama'ah: Sejarah, Jatidiri, Ajaran, dan Tradisi.*

Fakta-fakta inilah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penulisan buku ini agar diperoleh pengetahuan sistematis mengenai pemikiran Islam-kebangsaan, khususnya tentang khilafah Islam dan terorisme yang akhir-akhir ini terus menjadi perbincangan publik.

B. MASALAH DAN TUJUAN

Pokok masalah buku ini membahas tentang pemikiran Islam-kebangsaan kontemporer dalam konstruksi pemikiran kyai NU Jember. Ruang lingkup dari diskursus pemikiran ini dibatasi pada tema khusus, yakni: sikap dan pandangan kyai tentang sistem khilafah yang hendak ditegakkan sebagian kelompok Islam dan sikap dan pandangan kyai tentang terorisme yang sudah bermetaformosa menjadi aksi meresahkan. Adapun tujuan penulisan buku ini adalah memahami kontruksi pemikiran para kyai tentang khilafah dan terorisme.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan buku ini adalah lahirnya pemikiran yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk meneguhkan kembali identitas Islam Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lahirnya pemikiran yang dibangun dari ajaran Islam dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebangsaan, serta lahirnya pemikiran Islam-kebangsaan kontemporer yang tidak tercerabut dari akar-akar dan nilai budaya ke-

manusiaan universal yang tidak diskriminatif.

C. METODE PENULISAN

Buku ini ditulis sebagai hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan oleh karena karakter realitas yang dikaji dalam penulisan buku ini adalah realitas simbolik yang cenderung subyektif,[10] berupa sikap dan pandangan kyai NU Jember berkaitan dengan masalah khilafah dan terorisme di Indonesia. Realitas tersebut berkait dengan apa makna sebenarnya dari ucapan, komentar, dan tulisan mereka. Pendekatan kualitatif digunakan karena berkait dengan keinginan menemukan pengetahuan melalui cara berfikir induktif. Hal ini berbeda dengan penelitian yang bertumpu pada cara berfikir deduktif-logis yang didahului oleh adanya asumsi penelitian dan berbagai hipotesis ilmiah. Dengan alasan-alasan seperti itu, maka posisi penulis adalah orang yang sedang belajar dari apa yang menjadi pandangan subyek (*learning from the people*), [11]dalam

---

[10]Pendekatan kualitatif memiliki banyak jenis, tetapi apapun variannya, pendekatan kualitatif dikembangkan untuk mengkaji realitas simbolik yang cenderung subyektif dalam aksi-aksi manusia. Lihat Soetandyo Wingjosoebroto, "Grounded Research", Makalah Seminar Balai Kajian Sumber Daya Manusia, Fisip Unair pada 7-9 Oktober 1993.

[11]Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3, 1990), 8. Lihat pula Dede Oetomo, "Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial," dalam Makalah Seminar Balai Kajian Sumber Daya Manusia, Fisip Unair pada 7-9 Oktober 1993

hal ini pandangan kyai.

Adapun mereka yang dijadikan sebagai sumber data dalam penulisan buku ini adalah kyai NU Jember yang mempunyai kapasitas intelektual memadahi tentang masalah-masalah Islam-kebangsaan kontemporer. Kyai Muchit Muzadi (Mbah Muchit) tentu menjadi salah satu nama kyai yang dimaksud—di samping beberapa kyai lain—karena pandangannya yang selama ini dikenal mempunyai dimensi kebangsaan yang sangat kental. Selain alasan itu, Mbah Muchit hingga kini masih menjadi "teks hidup" dan menginspirasi lahirnya pemikiran Islam-kebangsaan di Indonesia. Ketokohan dan posisinya yang demikian sentral di tengah masyarakat NU, memposisikan Mbah Muchit sebagai sosok kyai yang kapasitas intelektualnya menjadi referensi nasional untuk masalah-masalah Islam-kebangsaan. Selain kyai "sepuh", seperti Mbah Muchit, penulis juga menggunakan sumber dari para kyai muda, seperti Kyai Mohammad Idrus, yang seringkali menyuarakan bahaya akan radikalisme serta kritik-kritiknya terhadap paham wahabi yang berkembang di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan buku ini terdiri atas sumber data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan berbagai tulisan para kyai. Adapun sumber data skunder diperoleh melalui teknik dokumenter, yaitu komentar mereka di berbagai media.

Analisis dilakukan dengan cara: Pertama, reduksi data, dilakukan sejak awal penelitian hingga seluruh data terkumpul. Reduksi data melibatkan langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data kemudian menyusun kode-kode dan catatan-catatan tentang tujuan penulisan bahasan pokok sehingga ditemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola pengetahuan. Kedua, penulisan disajikan sesuai tujuan penelitian. Penyajian buku ini melibatkan langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin kelompok data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis, dilibatkan dalam satu kesatuan. Ketiga, penarikan kesimpulan, melalui analisis terhadap seluruh data secara komperehensif.[12]

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan buku ini terbagi menjadi empat bagian, yang masing-masing bagian terdiri atas beberapa sub bagian.

Pertama, pendahuluan. Bagian ini diawali dengan latar belakang yang mengungkap tentang keterlibatan tokoh-tokoh NU sejak awal Indonesia berdiri hingga masa sekarang. Setelah latar belakang masalah, dilanjutkan dengan masalah dan tujuan, yang mengangkat tentang dua pokok persoalan, yaitu: tentang sikap dan pandangan kyai NU Jem-

---

[12]Lihat dalam Keith F. Punch, *Introduction To Social Research: Qualitatve & Quantitative Approaches* (London: Sage Publication, 1998), 202-204.

ber tentang khilafah Islam dan terorisme. Selanjutnya, setelah pokok persoalan, bagian ini secara berurutan menyajikan tentang tujuan, manfaat, dan metode penulisan.

Kedua, mengulas berbagai referensi tentang sumbangan kyai tentang pemikiran kebangsaan. Bagian awal menyajikan tentang sumbangan para kyai NU dalam memberikan pemikiran mereka untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam berbagai buku hasil penelitian, diketengahkan berbagai karya yang mengangkat pemikiran para kyai NU yang membahas tema kebangsaan. Selanjutnya, disajikan pula referensi yang mengulas kiprah kyai NU dalam sejarah sosial-politik di Indonesia. Adapun bagian akhir bab ini membahas tentang wacana pemikiran Islam kontemporer. Wacana ini dibatasi pada bahasan tentang "khilafah" dan "terorisme", di mana keduanya merupakan tema penting dalam pemikiran Islam kebangsaan kontemporer.

Ketiga, menyajikan tentang pandangan kyai NU tentang khilafah dan terorisme. Khusus pada bagian ini disampaikan bahasan tentang sikap-sikap dan pandangan kyai NU Jember mengenai penegakan sistem khilafah dan berbagai aksi teror di Indonesia. Pada bab keempat disajikan kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada hasil temuan dari sikap dan pandangan kyai tentang penegakkan sistem khilafah oleh sebagian kelompok Islam. Rekomendasi juga diberikan merespon pemahaman keagamaan radikal yang dila-

kukan kelompok Islam yang senantiasa menggunakan cara teror dan aksi kekerasan dalam mendakwahkan Islam secara ramah dan toleran.

BAB 2

PEMIKIRAN ISLAM KEBANGSAAN KYAI

A. SUMBANGAN PEMIKIRAN KYAI NU

Di Indonesia, kiai NU mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membumikan nilai-nilai Islam-kebangsaan. Mereka mempunyai andil besar dalam upaya membangun peradaban bangsa. Melalui perjuangannya yang tulus, telah terukir bermacam prestasi, antara lain peran mereka dalam penyediaan sarana pendidikan yang terjangkau, pemimpin sekaligus motivator bagi masyarakat, dan penjaga tradisi Islam *ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Kepemimpinan para kiai NU tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak di antara gagasan-gagasan mereka yang sangat brilian dalam diskursus pemikiran Islam-kebangsaan. Masalah ini telah diakui oleh peneliti asing, seperti Andree Feillard, yang menyata-

kan bahwa NU telah berhasil melakukan integrasi antara Islam dan negara. NU telah berhasil menyesuaikan dogma-dogma Islam terhadap negara-bangsa, yang beban utamanya sejak kemerdekaan adalah menghindari munculnya disintegrasi bangsa. Dengan keluwesan yang merupakan ciri khasnya, NU mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan bangunan politik Indonesia yang dikenal sangat majemuk, dengan tetap menggunakan kaidah *fiqhiyyah* yang menjadi pola pengambilan hukum dalam tradisi NU, tanpa meninggalkan apa yang menjadi tujuan utamanya untuk mengislamkan rakyat Indonesia.[1]

Selain Andree Feillard, ada beberapa studi yang mengetengahkan pemikiran kyai dan tokoh-tokoh NU tentang diskursus pemikiran Islam-kebangsaan. Misalnya, karya yang ditulis oleh Syamsul Munir Amin berjudul "Percikan Pemikiran Kyai". Pemikiran yang diusung oleh para kiai dalam buku ini cukup beragam, tetapi di dalamnya memuat perbincangan tentang kebangsaan. Buku ini memuat pandangan Kyai Hasyim Asy'ary, Idham Chalid, Ali Yafie, dan Ahmad Siddiq yang inti pandangan mereka adalah mengembangkan watak NU sebagai organisasi yang terbuka, fleksibel, dan adaptif. Sehingga dalam kerangka itu pula,

---

[1] Lihat tulisan Andree Feillard, "Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, Legitimasi, dan Pembaharuan", dalam Ellyasa KH. Dharwis (ed) *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, dan Pustaka Pelajar, 1994), 1-60

konsep *ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* bagi NU dapat dipahami sebagai suatu pengakuan terhadap tradisi masyarakat muslim dalam konteks adat di Indonesia, yaitu bagaiamana Islam masuk ke Indonesia dalam tradisi madzhab dan dalam aroma yang lebih sufistik. Karya ini mengungkap wawasan kebangsaan NU yang dibangun secara konsisten sehingga dapat menyiasati setiap perubahan yang terjadi, termasuk perubahan situasi politik nasional.[2]

Pemikiran Islam-kebangsaan ala NU juga ditemukan dalam buku "Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah", khususnya dalam konteks hubungan kaum tradisionalis dan modernis di Indonesia. Dinyatakan bahwa dekade Hasyim Asy'ary identik dengan era pertarungan antara entitas Islam Tradisional yang diwakili oleh masyarakat pesantren dan mayoritas umat Islam Indonesia yang berhaluan sunni, berhadapan dengan entitas Islam puritan dan pembaharu yang dikelompokkan dalam Islam Modernis. Kelompok Tradisionalis maupun Puritan-Modernis sama-sama mengaku sebagai entitas sunni dan secara geneologis bertemu pada simpul Ahmad bin Hanbal pendiri Madzhab Hanbali. Dalam kehidupan berbangsa yang selalu mengedepankan cita-cita perdamaian, Hasyim Asy'ary berhasil membawa pemikiran kaum tradisionalis

---

[2]Lihat Syamsul Arifin Munir, *Percikan Pemikiran Para Kyai* (Yaoyakarta: LkiS, 2009).

mereaktualisasi faham sunni. Studi ini di samping memberikan referensi bagi usaha reaktualisasi faham sunni dalam kehidupan berbangsa juga menambah menambah khazanah keilmuan baru, yaitu lahirnya konsep Sunni Partikular, yaitu ekspresi *ahl sunnah wal jamaah* dalam konteks ke-Indonesia-an, sekaligus kontekstualisasi faham sunni yang inklusif, moderat dan fleksibel dalam bersinggungan dengan masalah kesejarahan bangsa, baik pada sebelum atau sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia.[3]

Selain studi-studi di atas, pemikiran Islam-kebangsaan Kyai Hasyim Asy'ry juga berhasil ditulis oleh intelektual muda NU, Zuhairy Misrawi, judulnya "Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan". Dalam studi ini, Kyai Hasyim Asy'ry dinyatakan sangat memberi perhatian terhadap kondisi bangsa yang ditunjukkan dengan usahanya mendirikan koperasi, memberdayakan kaum perempuan, dan mendirikan organisasi yang dihuni oleh para ulama di pedesaan. Ia juga menjadi bagian penting bangsa era kolonial yang ditunjukkan dengan pemikirannya, yang memfatwakan wajib hukumnya untuk berjihad melawan Belanda dan haram hukumnya bekerja sama dalam hal apa pun dengan Belanda. Bahkan, di zaman penjajahan Jepang, ia berani melawan perintah Jepang untuk melakukan

---

[3]Lihat Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah* (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2010).

upacara saikerei, yaitu upacara membungkukkan badan setiap pagi ke arah Tokyo untuk menghormat kaisar Jepang dan Dewa Matahari, yang menyebabkannya dipenjara selama empat bulan.[4]

Literatur lain yang telah membicarakan tentang diskursus pemikiran Islam-kebangsaan NU juga ditulis buku karya Said Aqil Siradj yang berjudul "Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri". Buku ini menjelaskan tema-tema kebangsaan secara umum dalam tradisi pemikiran Islam tradisional. Dan buku karya Ali Maschan Moesa yang berjudul "*Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*", diterbitkan oleh Lkis Yogyakarta pada akhir tahun 2007. Buku ini adalah Disertasi dari KH. Ali Maschan Moesa dalam penyelesaian studi program doktornya di Universitas Airlangga. Buku ini membicarakan tentang pandangan beberapa Kyai Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur tentang wawasan kebangsaan atau nasionalisme. Hasil penelitian dalam buku ini menjelaskan bahwa beberapa Kyai NU yang dijadikan subyek mempunyai pemikiran Islam- kebangsaan, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa kecintaan kepada Islam lebih dari kecintaannya kepada negara dan bangsa (nasionalisme).[5]

---

[4]Lihat dalam Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010).

[5] Lihat dalam tulisan Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LkiS, 2007), 159.

Pemikiran Islam-kebangsaan tokoh NU juga menyentuh persoalan persoalan-persoalan aktual di masyarakat. Seperti ditemukan dalam literatur yang ditulis Jamal Ma'mur Asmani yang mengangkat pemikiran Kyai Muhammad Sahal Mahfudh dalam buku "Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi". Fikih sosial Kiai Sahal merupakan konsep aktif-progresif yang selalu mengacu pada lima prinsip pokok: pertama, interpretasi teks-teks fikih secara konstektual. Kedua, perubahan pola ber-mazhab dari qauly (tekstual) ke manhaji (metodologis). Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan yang cabang (furu'). Keempat, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial dan budaya. Sehingga fikih bersenyawa langsung dengan *'af'al al-mukallifin* sikap perilaku, kondisi, dan sepak terjang orang-orang muslim dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah (interaksi sosial ekonomi). Buku ini hadir untuk merekam perjalanan Kyai Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh semasa hidup dan pergulatan lahirnya diskursus pemikiran Islam-kebangsaan, fiqih sosial yang spektakuler.[6]

Pemikiran Achmad Siddiq tentang Islam-kebangsaan juga pernah dirilis oleh beberapa pengamat yang menemu-

---

[6]Lihat karya Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007).

kan keberhasilan Kyai Achmad Siddiq merumuskan secara jelas hubungan antara Islam dan Pancasila yang pada saat ia hidup menjadi isu kontroversial. Kyai Achmad Siddiq menjelaskan secara jernih bahwa Islam adalah agama dan Pancasila hanyalah sebuah ideologi. Agama dan Pancasila tidak boleh dicampuradukkan, agama berasal dari wahyu sementara ideologi merupakan hasil pemikiran manusia, dan bagaimanapun juga sebuah ideologi tidak akan pernah mencapai derajat ke tingkat agama. Umat Islam boleh berideologi apa saja asalkan ideologinya itu tidak bertentangan dengan ajaran agamanya. Menurut Kyai Achmad Siddiq, agama bisa dimasukkan dalam AD/ART pasal aqidah, sementara Pancasila dapat diletakkan pada pasal asas. Baginya, aqidah mempunyai posisi lebih tinggi daripada asas. Pemikiran Islam-kebangsaannya juga dapat dilihat dari keberhasilan membawa NU keluar dari pusaran politik praktis dengan kembali kepada khittah 1926.[7]

Membaca literatur tentang pergulatan pemikiran kyai NU dalam diskursus pemikiran Islam-kebangsaan kurang lengkap kiranya jika tidak membaca buku yang membahas pemikiran Gus Dur, salah satunya, "Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan". Dalam

---

[7]Lihat dalam tulisan Muhammad AS Hikam tentang "Khittah dan Penguatan Civil Society di Indonesia: Sebuah Kajian Historis Struktural atas NU Sejak 1984", dalam dalam Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LkiS, 1997), 133-163

buku ini, Gus Dur secara lugas melakukan diagnosa situasi nasional-bangsa dan problem keumatan dengan gagasan-gagasannya yang berani dan konstruktif. Wacana pemikirannya sengaja digelindingkan sebagai ikhtiar membingkai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa lebih kondusif, ada jaminan hukum yang adil dan terciptanya harmonisasi yang maksimal di antara sesama umat manusia.[8] Tema-tema pemikiran Gus Dur dalam buku ini dibingkai menjadi tiga bagian: (1) ajaran, transformasi pendidikan agama, (2) nasionalisme, gerakan sosial dan anti kekerasan, (3) pluralisme, kebudayaan dan hak asasi manusia. Secara umum, buku ini menyatakan pemikiran Gus Dur yang senantiasa mengajarkan nilai universal agama, nasionalisme, dan menjungjung tinggi sikap keterbukaan akan segala kemungkinan menerima perbedaan. Gus Dur mengenalkan khazanah pemikiran yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Satu karya penting yang membahas keterlibatan kiai dalam masyarakat dan yang melahirkan tesis penting tentang peran kiai sebagai agen perubahan (agent *of change*). Studi ini dilakukan Hiroko Horikoshi di Cipari, Jawa Barat dan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul ”Kyai dan Perubahan Sosial”.[9] Karya ini memperbaiki teori Clifford Geertz ten-

---

[8]Lihat Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).

[9]Periksa karya studi yang dihasilkan oleh peneliti berkebangsaan Jepang, Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Perhimpunan

tang peranan kiai sebagai ”makelar budaya” (*cultural broker*).[10] Menurut Geertz, kiai mempunyai peran sebagai alat penyaring atas arus informasi yang masuk ke dalam lingkungan santri, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap merusak bagi mereka. Namun, menurut Geertz, peranan kiai sebagai penyaring ini akan macet, ketika arus informasi yang masuk begitu deras dan tidak mungkin lagi dapat disaring oleh kiai. Dalam keadaan yang demikian ini, kiai akan kehilangan peran dalam proses perubahan sosial yang terjadi. Akibat pernanannya yang semain skunder tersebut, maka kiai akan mengalami apa yang disebut dengan istilah kesenjangan budaya (*cultural lag*) di masyarakat. Teori Geertz inilah yang diruntuhkan Horikoshi.

Studi tentang keterlibatan para kiai pesantren yang mempunyai latar belakang NU dalam aktivitas politik pasca runtuhnya Orde Baru juga pernah dilakukan di Yogyakarta oleh Khoiro Ummatin dalam bukunya, ”Perilaku Politik Kiai”.[11] Karya ini menfokuskan bahasan pada persoalan tentang perilaku kiai pesantren dalam kaitannya dengan perubahan peran sosial politik organisasi NU pasca reformasi.

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987).

[10]Lihat dalam Clifford Geertz, *The Javaanese Kijaji: the Changing Roles of a Cultural Broker. Comparative Studies in Society and History* (tt: tp, 1960), 2.

[11]Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Langkah politik NU secara organisasi dan kiai pesantren pada pemilu 1999 menurut penulis buku ini merupakan fenomena baru sejak NU kembali kepada khittah 1926. Keterlibatan institusi NU dan sejumlah kiai NU dalam deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuktikan bahwa kelompok kepentingan ini menaruh kepedulian terhadap nasib demokrasi di Indonesia, meskipun kebijakan itu bertabrakan dengan keputusan muktamar Situbondo. Tampilnya kiai-kiai NU dalam pendeklarasian PKB menjadi indikasi terjadinya perubahan peran sosial politik mereka dalam merespon perubahan sosial politik hingga pada dataran praksis.

Penulis buku ini juga menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh kiai-kiai NU mendeklarasikan PKB dinilai sangat strategis jika dibandingkan dengan situasi politik NU pada tahun 1955, saat di mana oraganisasi NU masih berposisi sebagai partai politik. Kondisi ini juga sangat berbeda jauh dengan kontribusi politik NU pada masa-masa Orde Baru berkuasa yang lebih memposisikan NU sebagai organisasi yang tidak mempunyai kekuatan pemaksa terhadap partai politik yang menjadi afiliasinya. Namun, di balik perbedaan-perbedaan tersebut muncul pula adanya persamaan-persamaan antara iklim politik NU masa lalu dengan iklim politik NU masa reformasi, yaitu sama-sama kuatnya dua institusi sosial (tradisi pesantren dan organisasi NU). Kuatnya dua

institusi NU ini memunculkan keseragaman perilaku politik sebagian besar kiai pesantren di Yogyakarta dalam memilih PKB pada pemilu tahun 1999.[12]

Keterlibatan kiai dalam kegiatan politik juga pernah diteliti oleh Imam Suprayogo dalam buku berjudul, ”Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai”. Buku setebal kurang-lebih 330 halaman ini melihat keterlibatan kiai dalam berbagai kegiatan masyarakat secara umum, salah satunya adalah keterlibatan dalam aspek politik pada pedesaan Jawa-Madura di Kecamatan Tebon Kabupaten Malang. Imam menyebutkan bahwa di dalam partisipasi politik, kiai menempuh cara yang berbeda. Afiliasi politik misalnya dilakukan oleh kiai dengan cara menyokong partai yang mendapat dukungan pemerintah. Tindakan ini dilakukan karena keinginan kiai mendapatkan fasilitas pemerintah untuk mengembangkan dakwahnya.[13] Dalam buku hasil penelitian ini, Imam memaparkan adanya kiai independen, yaitu kiai yang tidak tergantung pada kemauan pihak lain, kemauan pemerintah. Model kiai ini secara terang-terangan melakukan gerakan massa dalam mendukung partai yang bersebe-rangan dengan partai yang didukung pemerintah. Bentuk keterlibatan tersebut disebut Imam dengan istilah partisipasi aktif kritis. Pada bagian akhir tulisannya, Imam mengajukan

---

[12]Ibid., 103.

[13]Lihat proposisi yang dikemukakan dalam buku Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai* (Malang: UIN Press, 2007), 287.

proposisi, yaitu: jika kiai masih dipersepsi sebagai penyandang simbol kesucian agama, maka ia tetap memiliki kharisma dan jika terjadi perubahan sosial yang menimbulkan persepsi, maka hubungan kiai dan umat berubah.[14]

B. KIAI DALAM DINAMIKA SOSIAL-POLITIK

Dalam tradisi masyarakat NU atau dikenal dengan istilah warga nahdhiyyin, kiai merupakan pribadi yang memiliki tempat sangat istimewa. Pendapatnya seringkali menjadi rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan, bukan saja dalam masalah-masalah agama, tetapi juga masalah-masalah sosial-politik,[15] baik yang mengikat kepentingan individu maupun kepentingan kolektif.[16] Oleh karena posisi yang istimewa itu, kelompok kiai selalu ditempatkan sebagai *pressure group* dan *rulling class* yang pengaruhnya dapat melampui kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin formal.[17]

Keterlibatan kiai yang demikian penting dalam dina-

---

[14]Ibid., 290

[15]Keterlibatan Kiai dalam politik sudah muncul secara formal ketika partai politik Masyumi sebagai representasi partai politik Islam terbentuk. Ketika NU keluar dari Masyumi yang kemudian menjadikan NU sebagai Partai politik, kiai-pun secara aktif ikut terlibat. Bahkan pada masa Orde Baru sampai Orde Reformasi, kiai masih memegang peran yang cukup strategis, terutama dalam penggalangan massa pada tingkat *grassroot*.

[16]Asep Saifullah Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* (Jakarta: LP3ES, 2004) 37-38.

[17]Ibid., 43.

mika politik kebangsaan dapat ditelusuri dari peran mereka dari masa penjajahan kolonial. Ziemek dalam penelitiannya mengatakan bahwa para pejuang kemerdekaan melawan penjajah adalah para kiai yang merasa mendapat ilham dan terpanggil memprakarsai guna melawan penjajah.[18] Terkait itu, Bruinessen menyatakan bahwa dalam penyelidikan lebih seksama, tidak sedikit perlawanan terhadap penjajah Belanda dipimpin para kiai dan haji. Hal ini bisa dilihat dari peran Kiai Kasan Mukmin (Sidoarjo) yang memaklumkan diri sebagai *mahdi*. Ia juga mengajarkan ilmu kedigdayaan untuk berjihad melawan penjajah Belanda.[19]

Pada tahun 1935, para kiai NU juga mendesak Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI) untuk bersama GAPPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) meningkatkan tuntutan "Indonesia Berparlemen" kepada pemerintah Hindia-Belanda dan Pemerintah Belanda di Den Haag. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda.[20] Sebagaimana diketahui, MIAI adalah sebuah organisasi Islam seluruh Indonesia. MIAI telah bekerja sama dengan GAPPI sebagai gabungan dari partai-partai politik non-Islam dalam aksi menuntut Indonesia berparlemen. Kedua komunitas tersebut, memben-

---

[18] Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan* (Jakarta: P3M, 1986), 58.

[19] Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992), 27.

[20] Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren* (Bandung: al-Maarif, 1977), 142.

tuk Kongres Rakyat Indonesia (KORINDO), menuntut pemerintah Belanda di Den Haag agar rakyat Indonesia diberi hak sendiri untuk memerintah sendiri dengan suatu Badan Perwakilan Rakyat bernama ”Parlemen Indonesia”.

Para kiai juga telah melancarkan perlawanan terhadap Ordonansi Haji yang diterapkan oleh pemerintah Belanda karena memberatkan jemaah haji yang bermukim di Makkah. Dengan aturan tersebut, mereka harus bermuktamar di Menes Cirebon Jawa Barat pada tahun 1938, memutuskan bahwa Belanda harus mencabut keputusan tersebut dan membebaskan jemaah haji dari keharusan membayar pajak. Fakta ini menunjukkan bahwa Belanda tidak menyukai jemaah haji karena setelah pulang dari tanah suci mereka menjadi tokoh-tokoh pejuang yang siap memimpin masyarakat melawan Belanda.

Selanjutnya, masih dalam konteks hubungan dengan penjajah, pada tahun 1942, dunia pesantren digegerkan dengan penangkapan KH. Hasyim Asy’ary oleh tentara Jepang. Kiai Hasyim Asy’ary yang pada saat itu bertindak sebagai pemimpin tertinggi NU dijebloskan ke dalam penjara di Jombang kemudian dipindah ke Mojokerto, dan akhirnya dipenjara di Koblen Surabaya. Kiai Hasyim Asy’ari dipenjara selama tujuh bulan dan baru dibebaskan setelah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh santri dan beberapa kiai yang dipimpin oleh KH. Wahab Chasbullah dan KH.

Wahid Hasyim.

Keluarnya Resolusi Jihad ulama NU juga menandai berlangsungnya peran kiai dalam mempertahankan kemerdekaan melawan tentara Inggris dan Belanda. Fatwa tersebut memotivasi rakyat Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya untuk aktif dalam perang tanggal 10 November 1945. Fatwa ulama NU itu berisi: (1) Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan, (2) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan, meskipun meminta pengorbanan harta dan jiwa, (3) Musuh-musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang lagi membonceng tugas-tugas tentara sekutu (Amerika Inggris), dalam hal tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia, (4) Kewajiban tersebut adalah ”jihad” dan menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam (*fardhu ’ain*) yang berada dalam jarak radius sembilan puluh empat kilometer (jarak di mana umat Islam boleh shalat jama’ qasar)...[21]

Dalam hal mempertahankan kemerdekaaan Republik Indonesia, para kiai NU juga membentuk barisan tentara yang populer dengan sebutan *hisbullah* (tentara Allah) dan

---

[21]PWNU Jawa Timur, *Peranan Ulama dalam Kemerdekaan*(Surabaya, PWNU Jawa Timur, 1995).

sabilillah (jalan Allah). Lasykar *hisbullah* dan *sabilillah* ini didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang dengan latihan Cibasurak, sebuah desa dekat Karawang, Bekasi, Jawa Barat. Latihan-latihan ini menghasilkan sejumlah tokoh yang di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin tentara kita. Lasykar hisbullah berada di bawah komando spiritual KH. Hasyim Asy'ary dan secara militer dipimpin oleh KH. Zainul Arifin, sedangkan lasykar sabilillah dipimpin oleh KH. Masykur. Peranan kiai NU juga tidak terbatas pada lasykar hisbullah dan sabilillah, tatapi banyak di antara mereka yang menjadi anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA). Sebagaimana diketahui, sebagian tentara nasional berasal dari tentara-tentara PETA. Bahkan, dari enam puluh batalyon tentara PETA, hampir separuhnya adalah kiai.

Dalam hal mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para kiai NU juga pernah mengambil keputusan penting, yakni keabsahan Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Soekarno menjadi presiden bukan melalui pemilihan umum dan karenanya sebagian umat belum memberikan pengakuannya secara formal. Dalam pada itulah, pernah muncul serentetan pemberontakan yang dilakukan baik dari kalangan Islam sendiri, seperti Gerakan Darul Islam (DI)/ Tentara Islam Indonesia (TII) pimpinan Kartosuwiryo, maupun gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok Non-

Muslin, seperti Republik Maluku Selatan (RMS).

Pada Mei 1952, bertempat di Cipanas Bogor, para kiai NU seluruh Indonesia mengadakan konfrensi alim ulama. Untuk membahas status Soekarno dan para menterinya sebagai pemimpin dalam pandangan Islam. Hasil dari musyawarah itu adalah bahwa Soekarno adalah *Waly al-amr al-dharuri bi al-syaukah* (presiden yang sah dalam keadaan darurat yang secara *de facto* memiliki kekuasaan). Secara lebih detail, hasil konfrensi Cipanas tersebut adalah: pertama, presiden sebagai kepala negara serta alat-alat negara sebagaimana dimaksud dalam UUD (sementara), pasal 44, yakni Presiden, Menteri-mentri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan Negara adalah *Waly al-amr al-dharuri bi al-syaukah*. Kedua, terhadap qadhi-qadhi nikah yang dipilih oleh *Ahl al-hall wa al-'aqd*, seperti halnya yang berlaku di daerah Sumatera Barat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten dapat mengesahkan kedudukan para qadhi tersebut selaku petugas Nikah, talak, dan Rujuk (NTR) dan sekaligus melakukan tugas seagai seorang wali hakim.

Dalam rangka penerimaan asas tunggal Pancasila yang secara normatif membatasi ruang gerak politik formal, para kiai NU juga secara seksama mengeluarkan khittah 1926 pada tahun 1984 melalui muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur. Munculnya khittah ini dapat dihubungkan de-

ngan beberapa faktor, antara lain karena kebijakan Orde Baru awal dekade 1980-an yang memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal.[22] Dalam khittah itu disebutkan bahwa NU tidak menjadi bagian dari partai politik manapun. Warga NU diperbolehkan menjadi partisipan bagi semua partai politik, tetapi secara institusional NU tidak lagi berurusan dengan kepentingan-kepentingan politik praktis. Setelah khittah ini, perjuangan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan lebih diorientasikan kepada masalah dakwah dan kegiatan sosial-keagamaan. Para kiai diharapkan dapat mengurus kembali lembaga pesantren yang sejak awal menjadi pusat transformasi ajaran Islam tradisional.

Akan tetapi, pada perkembangan mutaakhir, posisi itu kemudian bergeser tidak seperti pada masa-masa sebelumnya. Belakangan muncul fenomena pergeseran peran religius kiai yang pada dasarnya merupakan pergulatan ideologis antar kelompok kepentingan politik yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyentuh kehidupan kiai dan pesantren. Konsekuensinya, peran-peran kultural kiai sebagai kekuatan arus bawah mulai bergeser.[23] Sinyalemen yang berkembang bahwa kiprah kiai dalam dunia politik agaknya menjai suatu hal yang tidak lagi terbantahkan.

---

[22]Lihat peran Kiai Achmad Siddiq dalam proses penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 147.

[23]Ibid.,53.

Sinyalemen ini didukung oleh banyaknya realitas kiai yang terlibat dalam dunia politik pasca masa reformasi.

Pengertian politik dalam pembahasan ini dikaitkan dengan masalah-masalah pemerintahan, kekuasaan, konflik, partai politik atau upaya-upaya yang ditempuh seseorang atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingan warga negara. Karena itulah, istilah politik sesungguhnya merangkum pengertian yang luas. Menurut Surbakti, sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai politik, yaitu:[24] (1) politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kepentingan bersama, (2) politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, (3) politik sebagai segala kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, (4) politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kabijakan umum, dan (5) politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Berbagai pandangan di atas mempunyai relevansi dengan konteks penelitian ini, yaitu terkait dengan otoritas kiai sebagai elit NU atau tokoh masyarakat yang membutuhkan upaya-upaya mempertahankan nilai. Politik sebagai seperangkat alat tertentu tentu mempunyai logika sesuai dengan

[24]Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), 1-8.

kemauan yang dikehendaki para elit masyarakat. Kiai sebagai elit masyarakat memerlukan upaya mempertahankan otoritas dan karena itu di antaranya ada yang terlibat memberikan partisipasi politik atau berperan dalam melakukan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Partisipasi mengandaikan nuansa keaktifan dan kesengajaan. Sedangkan istilah terlibat menggambarkan bahwa kiai sesungguhnya mungkin tidak aktif dan tidak sengaja ikut ambil bagian, tetapi karena posisinya sebagai pihak yang memiliki pengaruh. Posisi inilah yang menarik pihak-pihak tertentu bersaing mendapatkan keuntungan politik.

Kajian ini sengaja menfokuskan perhatian kepada bagaimana kiai memberikan respon terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti memberikan pandangannya dalam meletakkan hubungan Islam sebagai nilai yang ada di dalam diri dengan praktik politik. Politik dimaknai sebagai gejala yang serba hadir di tengah kehidupan masyarakat, yang diwarnai oleh perebutan pengaruh. Dalam konteks seperti itu, ajaran Islam yang dipahami kiai tertentu dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pemecahan masalah. Hal ini dapat dipahami karena Islam bukan sekedar petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*), tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun min nas*). Kandungan Islam bukan sekedar membahas masalah ubudiyah, tetapi juga

berisi tentang muamalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia menata kehidupannya, sebagaimana banyak pandangan dikemukakan tentang hubungan Islam dan politik.[25]

Dalam kaitan dengan praktik politik warga nahdhiyyin, sebagian pengamat mengatakan bahwa dalam kaitan dengan masalah ibadah, perilaku warga NU dan termasuk kiai-kiainya selalu bertumpuh kepada doktrin-doktrin aqidah Ahlussunah wal Jama'ah.[26] Doktrin-doktrin itu dibingkai di dalam tiga pilar inti, yaitu bertauhid dengan mengikuti faham Imam al-Asy'ary dan al-Maturidi, berfikih mengikuti salah satu dari empat madhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), dan dalam masalah-masalah tasawuf mengikuti faham yang diajarkan oleh Imam Junaidi al-Baghdadi dan al-Ghazali. Khusus dalam berfikih, kalangan NU mengembangkan literatur-literatur keputusan hukum agama dalam skala yang lebih besar serta cara-cara menyusun pemikiran hukum dengan teori hukum (*ushul fiqh*) yang disusun oleh Imam al-Syafi'i.

---

[25]Lihat karya-karya dalam bahasan penelitian terdahulu, antara lain Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007); dan Saiful Muzani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pacsa-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Utama, 2007)

[26]Lihat pembahasan tentang "Kiai dan Paham Ahlussunnah wa al-Jama'ah" dalam Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 98.

C. WACANA PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER

"Pemikiran" berasal dari perkataan kata Arab "fakran", mengikuti wazan 'fakara', 'yakiru', 'fakran' atau 'fikran'. Dalam al-Quran, perkataan fikr disebut dalam bentuk fi'il madhi (perbuatan yang berlalu) dan mudhari' (perbuatan yang sedang dilakukan), sighat mukhatab dan ghaib (kata ganti diri kedua dan ketiga), misalnya, "fakkara" dan "tatafakkarun". Al-Quran menggunakan cara ini seolah-olah Allah SWT mengingatkan bahwa usaha berfikir adalah usaha yang dilakukan manusia melalui kemampuan intelektualnya dalam mengabstraksikan fenomena sosial dan gejala lainnya sebagai obyek berfikir manusia ke dalam bahasa intelektual dan ilmiah.[27] "Pemikiran" dengan demikian adalah istilah yang merujuk kepada produk atau hasil dari proses seseorang mengabstraksikan sesuatu melalui kemampuan bernalarnya secara sistematis dan mendalam berupa ide-ide dan gagasan. Kata "Islam-kebangsaan" dalam tulisan ini merujuk kepada perihal yang berkaitan dengan masalah Islam dan kenegaraan. Adapun istilah "kontemporer" merujuk kepada masa kekinian.

Dari pengertian istilah-istilah tersebut, maka yang di-

[27]Periksa pandangan Luthfi Assyaukani dalam upayanya mendefiniskan istilah "pemikiran" dalam tulisan berjudul "Pemetaan dan Diskursus Pemikiran Islam Timur Tengah Era Modern" diakses dari *http://mahir-al-hujjah.blogspot.com/2008/07/konsep-umum-pemikiran-dan-pemikiran.html*. (Mei 2013)

maksud "Pemikiran Islam-kebangsaan kontemporer" adalah ide, gagasan, dan pandangan yang dihasilkan melalui penalaran secara sistematis dan mendalam perihal yang berkaitan dengan masalah Islam dan kenegaraan yang terjadi pada masa kekinian. Sebagaimana diketahui, diskursus Islam-kebangsaan kontemporer diwarnai munculnya berbagai isu, antara lain munculnya gagasan khilafah dan paham teroris yang bermetaformasa menjadi aksi meresahkan.

"Khilafah" sendiri adalah sistem yang dipahami sebagai aktualisasi dari kemauan Allah terhadap kaum muslim. Istilah ini merujuk kepada institusi kepala negara dalam Islam.[28] Manusia diwajibkan mengatur diri mereka sendiri dan memakmurkan bumi sebaik mungkin dalam kerangka Ilahiyah. Aktualisasinya berada dalam sejarah, bersifat individual dan komunal, jasmani dan rohani, serta internal dan eksternal. Dalam sistem khilafah, kaum Muslim harus mengorganisasi diri secara bersama, menegakkan sebuah sistem untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan mewujudkan tujuan Tuhan di dunia. Khilafah oleh sebagian komunitas Islam berlaku untuk semua manusia seutuhnya. Sistem khilafah tidak mengenal perbedaan manusia disebabkan karena perbedaan latar belakang wilayah, warna kulit,

[28]Lihat penjelasan ini pada tulisan Toha Hamim, "Haruskah Negara-negara Islam Dipimpin Lagi Oleh Seorang Khalifah, Bukan Presiden" dalam *Islam dan NU Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer* (Surabaya: Diantama, 2004), 3-17.

bahasa dan lain-lain. Islam memandang negara sebagai kosmik dan universal. Oleh karenanya, di dalam Islam tidak dikenal istilah Barat dan Timur, Asia dan Afrika, berkuliat hitam dan putih, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Manusia dalam Islam adalah sederajat, makhluk Allah, dan wajib tunduk kepada kemauan-Nya.[29]

Dalam kerangka fikir seperti itu, sistem khilafah mempunyai implikasi serius bagi pemerintahan negara-bangsa dalam sistem negara demokrasi modern. Pertama, sistem negara-bangsa yang ada harus dibubarkan dan digantikan oleh satu sistem kekhalifahan. Kedua, undang-undang negara yang berlaku dalam sistem demokrasi modern harus digantikan dengan syari'at Islam. Ketiga, menghapus semua lembaga pemerintahan dan meletakkan seluruh tangggung-jawabnya kepada seorang khalifah. Implikasi-implikasi tersebut mengandaikan sebuah sistem pemerintahan sentralistik yang didasarkan kepada nomocracy, kekuasaan yang tunduk kepada hukum syari'at. Hukum syari'at tidak bisa diamandemen sesuai kemauan warga negara (seperti yang ada dalam sistem demokrasi modern) karena hukum tidak bersumber dari mereka, melainkan berasal dari Tuhan. Warga negara bukanlah pihak yang mengeluarkan dan menetapkan hukum, melainkan Allah sendiri yang mengeluarkan melalui

---

[29] Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 54.

wahyu. Oleh karena itu, hukum bersifat abadi. Perubahan hanya terjadi pada pemaknaan manusia berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya.[30]

Selain khilafah, muncul pula wacana terorisme. Pada 1980-an, bersama dengan istilah-istilah lain, seperti "fundamentalisme" dan "radikalisme" dipopulerkan oleh media Barat yang dikaitkan dengan tingkah-laku politik komunitas Timur Tengah yang berkonotasi negatif, dalam arti tidak disukai oleh Barat. Akibatnya, setiap kali mendengar istilah terorisme, maka yang teringat adalah Osama bin Laden, Khomeini, Hizbullah, Jihad Islam, dan lain-lain. Pemahaman yang dikenalkan oleh media Barat tersebut mencerminkan ketidaksukaan Barat terhadap musuh-musuhnya di Timur Tengah. Sebab, Israel sekalipun telah melakukan aksi pembantaian terhadap warga sipil Palestina, tidak dikategorikan sebagai terorisme. Demikian pula, aksi invasi negara Amerika Serikat sendiri yang menewaskan ribuan warga sipil di Irak dan Afghanistan tidak pernah mendapat label terorisme. Bahkan, aksi itu dianggap sebagai aksi kepahlawanan menumpas terorisme.[31]

---

[30] Bandingkan dengan artikel yang ditulis Azyumaardi Azra di Harian Kompas, Agustus 2007, berjudul "Relevansi Khilafah di Indonesia". Azra mengutip sejarawan Islam, Ibn Khaldun, mengatakan bahwa khalifah dalam Islam telah berakhir sejak berakhirnya masa al-Khulafa' al-Rasyidun", sedang entitas politik berikutnya adalah kerajaan atau kesultanan.

[31] Lihat Artikel Riza Sihbudi, "Dimensi Internasional Terorisme", dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi* (Jakarta: The

Kesulitan mendefinisikan terorime diakui oleh Fathi Osman. Dalam salah satu tulisannya, ia mengemukakan bahwa jika terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan tertentu, maka semua aksi militer pun bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Demikian pula, jika terorisme diartikan sebagai tindakan menyakiti orang, maka penggunaan senjata berat dalam peperangan pun jelas merupakan tindakan teroris karena telah melukai ribuan bahkan jutaan orang. Menurut Noam Chomsky, istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18 untuk menunjuk kepada aksi kekerasan yang dilakukan oleh rezim penguasa dalam menjamin ketaatan rakyat. Arti asli terorisme ini di kemudian hari berbalik untuk dilabelkan kepada aksi individu atau kelompok yang melakukan pembalasan terhadap rezim penguasa. Ini berarti memberikan pemahaman bahwa secara umum terdapat terorisme negara (*state terrorism*) dan terorisme yang berlabel non negara (*non-state terrorism*). Namun, pada perkembangan terakhir, justru banyak dikembangkan isu terorisme non negara, sedangkan terorisme negara lebih cenderung diabaikan.[32]

Dalam konteks Indonesia, masalah terorisme dapat dilihat dengan empat perspektif. Pertama, reaksi Islam fundamentalis terhadap dunia global, lebih khusus lagi Amerika

---

Circle for Contemporary Political Studies, 2006), 48

[32] Ibid., 50

Serikat yang dinilai lebih memojokkan Islam. Kedua, realitas politik aliran di Indonesia berkaitan dengan adanya sebagian kelompok Islam yang belum puas mempersoalkan posisi dan peran Islam dalam kehidupan bernegara. Ketiga, transisi demokrasi yang masih menyisahkan beberapa persoalan, antara lain konsolidasi kekuasaan, stabilitas politik dan krisis ekonomi. Keempat, reaksi kelompok-kelompok masyarakat sipil terhadap kebijakan negara dalam hal pertahanan dan keamanan di era transisi demokrasi, termasuk di dalamnya penanganan terhadap masalah pelanggaran moral.[33]

[33]Lihat tulisan Zaini Rahman,"Terorisme dan Ruang Artikulasi Politik", dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi* (Jakarta: The Circle for Contemporary Political Studies, 2006), 133. Bandingkan pandangan yang mengatakan hubungan terorisme dengan identitas soliter, yaitu identitas tunggal yang dianggap sebagai satu-satunya yang benar, identitas dipahami sebagai takdir, bukan sesuatu yang dinamis dan kontekstual. Lihat Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004), 74.

BAB 3

KHILAFAH DAN TERORISME PERSPEKTIF KYAI

A. SISTEM KHILAFAH DI INDONESIA

Pada perkembangan terakhir, Muslim Indonesia mulai merasakan dampak langsung dari proses globalisasi. Informasi yang dibaca oleh masyarakat Islam pada umumnya, tidak saja berkontribusi mengembangkan satu sektor dalam kehidupan sosial mereka. Akan tetapi juga berpengaruh secara langsung dalam melahirkan sebuah kerangka kesadaran sosial-religius. Dalam sejarah berdirinya negara-bangsa misalnya, sebagaimana disadari bersama bahwa Indonesia memiliki ragam organisasi yang dinilai menjadi "perekat" dalam membangun asas keberagamaan yang toleran, terbuka, damai dan bertoleransi tinggi. Organisasi yang dimaksud salah satuhnya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi

sosial keagamaan dan kemasyarakatan ini hingga sekarang masih konsisten mengawal Indonesia sebagai negara kesatuan yang tidak harus berdasarkan agama, apalagi menjadi negara yang berdasarkan agama Islam.

Sebagaimana dipahami bersama, Indonesia diperjuangkan bukan hanya oleh komunitas masyarakat yang memeluk Islam. Namun, oleh banyak agama, suku, ras dan bahkan oleh rakyat yang berbeda bahasanya. Mereka turut memperjuangkan Indonesia yang merdeka, berdaulat dan negara yang mandiri bebas dari penjajahan dalam berbagai bentuk dan modelnya.[1] Oleh karena itu, jika hari ini hadir sebagian umat yang menginginkan Indonesia harus berasaskan Islam apalagi memiliki undang-undang formal yang berdasarkan Islam, maka hal itu akan mencederai konsensus pendirian bangsa yang sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka tahun 1945.

Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri adanya gerakan Islam di Indonesia yang memperjuangkan lahirnya sistem khilafah Islam sebagai prototipe model kepemimpinan yang ideal. Namun, menjadi sangat tidak bijak apabila kehadiran mereka hanya ingin merubah pandangan ideologi bernegara, sebagaimana diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia

---

[1] Lihat dalam As'ad Said Ali, *Negara Pancasila; Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009) bandingkan dengan Ayu Sutarto, *Menjadi NU Menjadi Indonesia; Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi* (Surabaya: Khalista & Kompyawisda Jatim, 2008).

(HTI),[2] tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang merdeka pada 1945.

Berikut ini beberapa sikap dan pandangan kyai Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jember, tentang penegakan sistem Khilafah Islamiyah di Indonesia serta maraknya gerakan teroris yang mengatasnamakan Islam dan kini sudah bermetaformasa menjadi aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat. Dalam penelitian ini, ditampilkan beberapa pandangan kyai NU di Jember dengan latar belakang pendidikan dan aktifitas yang berbeda. Pertama, peneliti memilih Kyai Muhammad Idrus Romli.[3] Sosok ini dikenal sebagai tipe kiai muda NU yang tidak memiliki santri menetap sebagaimana pendefinisian kyai yang dilakukan Zamakhsyari Dhofier.[4] Sosok kyai ini dipilih karena memiliki pemikiran yang cukup brilian dalam beberapa karyanya. Bahkan, sebagian pemikirannya dijadikan sebagai rujukan oleh kalangan masyarakat NU di Jember dan disekitarnya. Kyai Idrus Romli adalah sosok kyai muda NU yang tidak dibesarkan dalam tradisi intelektual di perguruan tinggi, tetapi memiliki pen-

---

[2]Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 1-18.

[3]Pengurus Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Jember dan LBM PBNU Jakarta

Tutor Kuliah Aswaja di PWNU Jatim dan PBNU.

[4] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 93.

galaman pendidikan pesantren yang mendalam dan sangat kuat tradisi pemikirannya.

Kedua, penelitia memilih Kyai Haji Muchith Muzadi (Mbah Muchith),[5] dan Kyai Haji Muhammad Hasien.[6] Mereka berdua merupakan merupakan tipe kyai yang tidak memiliki pondok pesantren, tetapi kapasitas intelektual mereka dikenal oleh masyarakat luas. Mereka di samping aktif dalam kegiatan ceramah juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan di masyarakat, baik langsung atau tidak langsung, melalui media elektronik maupun pengajian rutin jamaah NU dan lain sebagainya. Mereka dikenal sebagai tipe kyai yang fleksibel dalam pergaulan dengan semua lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga pejabat. Kapasistas intelektual mereka selain diperoleh dari pesantren, juga diperoleh melalui proses pendidikan modern. Mereka pernah tercatat sebagai pengajar di perguruan tinggi. Mbah Muchith khususnya, adalah sosok kyai yang namanya dikenal secara

---

[5]KH Abdul Muchith Muzadi adalah pengurus *Mustasyar* PBNU yang pemikirannya tentang ke-NU-an dank e-Indonesia-an banyak dijadikan rujukan, baik oleh peneliti dalam negeri maupun peneliti luar negeri. Salah satu peneliti yang konsen mengikuti pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi adalah Prof. Ayu Sutarto, budayawan asal Pacitan yang menjadi dosen di Universitas Jember (UNEJ). Bahkan pemikiran KH Abdul Muchith Muzadi tentang peran domestic perempuan diteliti dalam sebuah disertasi oleh MN Harisuddin tahun 2012 yang lalu di IAIN Surabaya.

[6]Ketua Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama Jember (LTM NU) Jember, mantan pengurus LDNU Jember, Ketua Umum Yayasan Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember, nara sumber dialog agama via udara di RRI Jember, pengurus dewan pendidikan Kabupaten Jember.

luas karena pemikiran-pemikirannya.

Ketiga, peneliti memilih Kyai Haji Misrawie.[7] Sosok kyai ini mewakili tipe kyai NU di Jember yang memiliki pondok pesantren dan menduduki jabatan struktural di jajaran organisasi NU. Kyai Misrawie selain dikenal memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren yang kuat juga berlatar pendidikan untuk ilmu-ilmu yang jarang dipelajari di lingkungan pondok pesantren NU, misalkan ilmu manajemen bisnis, pengembangan usaha mikro dan makro dan lain sebagainya. Keempat, peneliti memilih Kyai Pujiono Abdul Hamid.[8] Sosok kyai ini dipilih sebagai representasi dari pengurus harian NU yang kapasitas ilmunya layak untuk disebut sebagai kyai muda di lingkungan NU Jember. Sosok kyai ini kesehariannya menjadi penyemai pemahaman Islam inklusif (aswaja nahdliyah) kepada santri dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam di Jember dan sekitarnya. Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam ini dikenal juga memiliki perhatian terhadap pegembangan pemikiran Islam bagi kader NU di perguruan tinggi yang sedang membangun kapasitas ilmunya.

Beberapa pandangan kyai NU Jember tentang Khilafah

[7]Wakil Ketua NU Jember, Dosen Sekolah Tinggi Mandala Jember, Pengasuh Pondok Pesantren At Tayyibah Kecamatan Sumbersari Jember.

[8] Pengurus harian NU Jember (*Bendahara Umum* NU Jember), dosen Program Pascasarjana STAIN Jember. Wawancara 14 Oktober 2013. Tempat wawancara, STAIN Jember.

Islamiyah disajikan dalam bentuk hasil wawancara. Kutipan hasil wawancara dengan Muhammad Idrus Romli tentang cita-cita Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang hendak mendirikan khilafah adalah sebagai berikut:

> HTI itu menurut saya tidak konsisten. Bagaimana dia menilai orang kafir kepada orang Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai asas bernegara, sementara mereka juga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini kan menunjukkan kalau mereka tidak paham dengan perjuangannnya. Selain itu, kenapa mereka masih sekolah dan kuliah di kampus yang jelas-jelas mengakui Pancasila sebagai asas bernegara, dosennyapun mengakui Pancasila, berarti mereka kan diajari oleh orang-orang yang memang mereka kafirkan karena menjadikan Pancasila sebagai asas bernegara. Itulah salah satu bentuk inkonsistensi mereka.[9]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diambil sebuah pemahaman bahwa Muhammad Indrus Romli, termasuk kyai muda NU yang sangat keras dalam menyikapi keberadaan HTI di Indonesia. Menurutnya, HTI termasuk organisasi yang tidak paham sejarah dan inkosisten. Pernyataan itu juga pernah disampaikan dalam kuliah umum ahlussunnah wal jamaah (aswaja) setiap Sabtu akhir bulan di Masjid Jami' Al-Baitul Amien. Pernyataan tersebut juga pernah disampai-

---

[9] Wawancara Kyai Muhammad Idrus Romli pada Selasa, 26 Nopember 2013.

kannya dalam forum-forum ilmiah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Bahkan kyai muda ini dalam beberapa buku karyanya menyebutkan penolakan terhadap ideologi yang diperjuangkan oleh HTI. Secara khusus, Muhammad Idrus Romli yang diberi rubrik khusus menjawab berbagai problem yang membelit masalah ke-NU-an, memberikan penjelasan tentang Khilafah Islamiyah, sebagaimana terdapat dalam majalah AULA edisi bulan Desember 2012.[10]

Terkait dengan masa depan HTI di Indonesia, Muhammad Idrus Romli memiliki pandangan yang berbeda dengan keyakinan kelompok HTI yang memiliki optimisme tinggi, sebagaimana berikut:

> HTI itu sulit ditegakkan, pondasinya saja lemah. Terus indikator yang kedua, pengikut mereka masih sedikit, dan yang ikut mereka orang-orang kampusan yang tidak paham agama secara mendalam. Mereka juga mengajak orang-orang desa yang sebetulnya basisnya NU yang rata-rata pemahaman keagamaannya lemah. Tapi bagi saya, HTI sulit berkembang di Indonesia, karena para kiai dan *masyayikh* masih istiqomah dengan perjuangannya. Kalau mau jujur, siapa yang dapat dilihat di dalam HTI? Kan tidak ada kiai-kiainya, hanya saja mereka mengangkat orang yang sudah haji menjadi kiai.[11]

---

[10] Muhammad Idrus Romli, *Memperjuangkan Khilafah, Wajibkah?* (Surabaya: Majalah AULA NU Jawa Timur, 2012), 30-31. Majalah edisi Desember. Selain itu karya beliau yang mengulas HTI dapat dibaca dalam bukunya berjudul *Cara Berdebat Dengan HTI,* diterbitkan Bina Aswaja Pasuruan Jawa Timur.

[11] Wawancara Kyai Muhammad Idrus Romli pada Selasa, 26 Nopember

Muhammad Idrus Romli juga mengatakan bahwa perjuangan orang-orang HTI tidak berasal dari akar rumput, sehingga sulit untuk bertahan. Sebagai organisasi yang mempunyai usia mudah, HTI membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini disinggung oleh Muhammad Idrus Romli dengan mengatakan bahwa aliran dana yang dimiliki HTI berasal dari luar negeri. Salah satu penilaian yang patut diamati secara mendalam adalah pernyataan Muhammad Idrus Romli bahwa aliran dana yang cukup besar tersebut berasal dari negara-negara penyokong HTI. Dana tersebut digunakan sebagai biaya penerbitan bulletin *Al-Islam* yang terbit beribu-ribu ekslempar pada setiap minggu. Selain *Al-Islam* juga ada majalah terbitan khusus tentang HTI, seperti majalah Al-Way'. Dalam bukunya, Ainur Rofiq Al-Amin menenggarai bahwa pendanaan HTI tidak datang semata-mata dari dalam negeri, tetapi juga berasal dari subsidi negara-negara pendukungnya.[12] "Yordania sebagai negara dimana HTI dilahirkan, sebenarnya tidak menghendaki keberadaan HTI, bahkan negera-negara Timur Tengah mulai tidak nyaman dengan keberdaan HTI, sehingga mereka eksodus ke Indonesia", kata Kyai Muhammad Idrus Romli menjawab pertanyaan tentang maraknya gerakan HTI di Indonesia. Mereka memperjuangkan Khilafah Islamiyah sebagai kewajiban, se-

2013.

[12] Lihat dalam Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 1-18.

bagaimana jawabannya berikut ini:

> HTI yang menggagas khilafah dan bahwa memperjuangkan khilafah adalah wajib. Itu semua tidak benar dan terlalu ekstrim. Yang benar itu, tidak harus khilafah, boleh mengangkat pemimpin dalam pengertian yang umum, misalkan raja, bupati, presiden, wali kota dan semacamnya. Mengangkat pemimpin tunggal sebagaimana digagas HTI itu kalau situasinya memungkinkan, kalau seperti sekarang sudah sangat tidak memungkinkan. Negara Timur-Tengah mana yang mau kita tiru sebagai model kepemimpinan Khilafah Islamiyah? Tidak ada sudah.[13]

Kata "wajib" dalam memperjuangkan dan menegakkan Khilafah Islamiyah menurut Muhammad Idrus Romli merupakan suatu bentuk penekanan dalam memperjuangkan ideologi mereka. Walaupun dalam agama sendiri tidak akan dijumpai kalimat wajib atau kewajiban menegakkan Khilafah Islamiyah. Dari hasil pemaparannya tentang perkembangan HTI di Indonesia, Muhammad Idrus Romli menunjukkan ekspresi kurang setuju dengan gagasan HTI yang mengusung tentang gagasan mendirikan sistem Khilafah Islamiyah. Muhammad Idrus Romli juga menyampaikan bahwa cita-cita HTI hampir mustahil dapat diwujudkan pada masa kepemimpinan sekarang.

---

[13] Wawancara Kyai Muhammad Idrus Romli pada Selasa, 26 Nopember 2013.

Selain pandangan kyai muda NU tersebut, peneliti juga mendapat pandangan dari KH Muchith Muzadi (Mbah Muchith). Mbah Muchith selalu bersemangat layaknya intelektual muda NU. Dalam wawancara dengan peneliti, Mbah Muchith pernah mengucapkan kalimat berikut: "Barang siapa dibunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid, barang siapa dibunuh karena membela darah (dirinya), maka ia mati syahid, barang siapa dibunuh karena membela agamanya, maka ia syahid, dan barang siapa dibunuh karena membela keluarganya, maka ia mati syahid".[14] Kalimat tersebut ditegaskan, sebagai bentuk inspirasi dalam resolusi jihad NU pada tahun 1945 dan 1949-an untuk mengusir Belanda dan Jepang yang menjajah Indonesia. Resolusi Jihad yang disampaikan oleh KH. Hasyim Asy'ari tersebut, rupanya tidak dapat meghilang dari ingatan dan hati Mbah Muchith. Hal ini sangat wajar, sebab secara keilmuan dan geneologi spritualitas, beliau bersambung secara langsung dengan Rois Akbar PBNU tersebut. Secara akademis, beliau termasuk kader langsung dari KH. Hasyim Asy'ari dalam menjaga dan memelihara NU di Indonesia hingga dewasa ini. Mbah Muchith menyatakan sebagai berikut:

> Kaum pesantren tidak mengikuti pendapat yang mewajibkan seluruh kaum muslimin sedunia berada di bawah

[14] Ucapan Mbah Muchit ini ditemukan dalam Al-Jami'us Shoghir Jilid. 6, halaman: 195.

> satu kekuasaan politik.[15] Yang diwajibkan adalah ukhuwah diantara mereka, baik secara individual, kelompok maupun pemerintah/kenegaraan dalam wujud kerjasama, saling membantu dan saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, menurut kondisi, kemampuan dan kepentingan masing-masing, kelompok (bangsa, sub bangsa atau gabungan bangsa) pada dasarnya mendapat kesempatan mendirikan komunitas politik (negara) sendiri, tidak harus menggabungkan diri dengan Negara lain.[16]

Pernyataan tersebut di atas dengan sangat tegas merujuk kalimat kaum pesantren, maka *khitab* (yang dituju) dari pendapat tersebut adalah masyarakat NU tidak boleh mengikuti pendapat yang memperjuangkan "pendapat" yang mewajibkan seluruh kaum muslimin sedunia berada di bawah satu kekuasaan politik. Rujukan kalimat tersebut adalah Khilafah Islamiyah yang sedang marak diperjuangkan oleh organisasi HTI. Sebab, hal itu dapat mencederai kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa ini. Mbah Muchith yang selalu santai dalam menyampaikan pendapat dan gagasan-gagasannya, sejak awal sekitar sejak tahun 1960-an sudah menolak gagasan mendirikan Khilafah Islamiyah. Menurutnya, yang diperlukan bukan kepemim-

---

[15] Yang dimaksud beliau dalam perkataan tersebut adalah Hizbut Tahrir (HT) atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

[16] Dikutip dari pendapat Kyai Abdul Muchith Muzadi, pada 6 November 2013.

pinan di bawah kendali satu orang. Namun, yang wajib dikedepankan adalah menjalin *ukhuwah islamiyah* (persudaraan sesama muslim) agar dibangun, dijaga dan dipelihara dengan baik. Mbah Muchith memberikan tanggapannya berikut:

> Demikianlah, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, dibenarkan oleh Islam untuk mendirikan sendiri, karena memang kondisi, kemampuan dan kepentingan kita cukup memenuhi syarat yang wajar bagi berdirinya Negara Indonesia. Oleh karena itulah, di dalam perjuangan melepaskan diri dan penjajahan dan mendirikan negara yang merdeka, kita lakukan dengan mengumpulkan kekuatan dan kemampuan, dengan mendidik dan mempersatukan sekian banyak suku di sekian luas wilayah Indonesia, supaya cukup kekuatan dan kemampuan mengusir penjajahan dan mendirikan negara merdeka yang dapat berdiri tegak bukan untuk satu dua tahun, satu dua abad, tetapi diharapkan untuk sepanjang zaman, karena mempunyai dukungan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya rohaniah yang cukup, di bawah ridlo Allah SWT.[17]

Dari pernyataan itu dapat dipahami bahwa umat Islam Indonesia memang masyarakat yang mayoritas jika dibandingkan dengan umat beragama yang lain, tetapi mereka tidak memberi ruang untuk gagasan-gagasan mendirikan

---

[17] Dikutip dari pendapat Kyai Abdul Muchith Muzadi, pada 6 November 2013.

Khilafah Islamiyah. Gagasan tersebut memang pernah ada dimasa dahulu, tetapi sejalan dengan perkembangan waktu, gagasan itu harus mempertimbangkan realitas yang ada. Dalam beberapa kali diskusi dan dialog yang membahas prinsip-prinsip *ahlus sunnah wal jamaah*, Mbah Muchith selalu menekankan bahwa NKRI sudah final, seperti disampaikannya kepada para aktivis PMII dan kader-kader fatayat NU Jember sekitar tahun 2011-an di kantor PCNU Jember. Bahkan pada tahun 2011-an yang lalu tersebut, hadir pula peneliti dari Jepang, yang juga ingin mengetahui secara langsung tentang pemikiran yang dikembangkan Mbah Muchith tentang keislaman dan keindonesiaan termasuk tentang Ke-NU-an. Mbah Muchith juga mempunyai pandangan sebagaimana berikut:

> Kaum muslimin Indonesia sudah ikut berjuang aktif, bahkan selalu berada di garis paling depan. Kesepakatan yang tercapai pada detik-detik proklamasi, adalah juga kesepakatan dimana kaum muslimin Indonesia ikut aktif merumuskan dan karena terikat dengan segala kesepakatan itu. Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan konstitusinya yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan serangkaian butir-butir dasar falsafatnya yang disebut Pancasila, adalah negara yang sah menurut ajaran Islam, karena kaum muslimin yang merupakan mayoritas bangsa dan rakyat Indonesia selalu ikut berjuang mewujudkannya, merumuskan konstitusinya serta memproklamasikannya. Islam

mengajarkan memenuhi ikatan janji.[18]

Pandangan Mbah Muchith "kesepakatan yang tercapai pada detik-detik proklamasi, adalah juga kesepakatan dimana kaum muslimin Indonesia ikut aktif merumuskan dan karena terikat dengan segala kesepakatan itu. Negara Republik Indonesia yang diprokamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 … dengan serangkaian butir-butir dasar falsafatmya yang disebut Pancasila, adalah negara yang sah menurut ajaran Islam" …merupakan cara pandang yang tidak perlu ditafsirkan ulang. Di sini, Mbah Muchith Muzadi termasuk ulama yang dengan tegas menolak perjuangan HTI untuk mendirikan Khilafah Islamiyah dimaksud. Sebagai ulama NU Jember yang pemikiran-pemikirannya selalu menjadi rujukan oleh masyarakat NU secara luas, Mbah Muchith sangat sadar tidak akan secara serampangan mengeluarkan pernyataannya. Mbah Muchith sangat menyadari bahwa apa yang akan ia sampaikan akan dicatat oleh generasi muda dan anak-anak NU secara keseluruhan. Pada saat yang sama Mbah Muchith juga menyadari bahwa pandangannya tersebut akan dijadikan rujukan bagi warga nahdliyyin. Dalam uraian selanjutnya, ia menjelaskan hal berikut:

[18] Dikutip dari pendapat Kyai Abdul Muchith Muzadi, pada 6 November 2013.

Negara yang sah itu wajib dipertahankan eksistensinya, keamanannya dari bahaya di dalam dan dari luar, dipertahankan keutuhannya, kesatuan dan persatuan rakyatnya serta segala kepentingannya, dengan kesediaan berkorban, baik pikiran, tenaga, kekayaan dan jiwa sekalipun. Kewajiban membela dan mempertahankan negara yang sah ini, bukan saja merupakan kewajiban nasional, namun juga kewajiban keagamaan. Islam mengajarkan kewajiban membela dari pribadi (baik secara fisik maupun secara non fisik), membela harta, membela keluarga, di samping membela agama dan negara.[19]

Dari paparan itu, tampak bahwa semangat Mbah Muchith untuk mempertahankan bangsa ini tetap berkobar dan tidak pernah berhenti. Hal ini sangat wajar. Sebab, Mbah Muchith dikenal sebagai salah satu kyai yang pernah merasakan perjuangan melawan Jepang pada saat negara ini menduduki Indonesia. Kalimat dan uraian yang disampaikan Mbah Muchith di atas, merupakan bukti nyata bahwa ulama-ulama NU sangat berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mengawal bentuk NKRI sampai pada titik yang tidak terbatas. Tentunya juga bukan hanya Mbah Muchith saja yang berkomitmen dengan NKRI sebagai harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar. Akan tetapi, masih banyak kyai NU yang secara riel menjadi komandan dan organ penting dalam memperjuangkan atau menjaga kesatuan Repub-

[19] Dikutip dari pendapat Kyai Abdul Muchith Muzadi, pada 6 November 2013.

lik Indonesia. Hal ini juga pernah dikatakan oleh Kyai A. Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU) bahwa NKRI merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Demikian pula dengan Kyai Said Aqil Siradj. Kyai yang juga ketua umum PBNU ini memiliki wawasan bahwa NKRI adalah harga mati. Kyai Said Aqil secara tegas menolak HTI sebagai organisasi Islam yang memperjuangkan Khilafah Islamiyah.

Secara khusus, bentuk NKRI yang disebut sebagai bentuk final bagi sistem negara dijelaskan Mbah Muchith berikut:

> Mengapa NKRI dinggap final..?..Hal itu terkait dengan sejarah perjalanan bangsa ini. Sekarang tidak banyak orang yang mengingat kalau negara kesatuan lawan dari negara federasi yang di gagas Belanda dalam konfrensi menja bundar .Padahal dulu orang di cap federal itu sama dengan antek Belanda."Itulah sebab mengapa kalimat NKRI menjadi Sakral."....Sedangkan kalimat "Final" bermakna NU tidak ingin mendirikan negara baru pengganti NKRI, baik yang model NII Kartosuwiryo atau Model yang lain"Perkara ngsisinya itu masih tetap jalan terus".[20]

---

[20] Lihat dalam https://fr-fr.facebook.com/notes/warga-nahdliyin-dukung-pancasila-tolak-khilafah/dapatkan-majalah-aula-edisi-april-2011-menjaga-nu-dan-nkri-memuat-kesaksian-mbah/10150149953251272?comment_id=16444914&offset=-20&total_comments=264 (di akses 25 Mei 2013)

Mbah Muchith juga menguraikan hal penting berkait dengan perjuangan rakyat Indonesia, sebagaimana pernyataan berikut:

> Praktek mempertahankan dan membela negara ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia sejak proklamasi diunumkan dan bahkan persiapannya sudah dilakukan sebelum proklamasi, dengan membentuk pasukan Hizbullah dan Sabilillah di zaman Jepang, disamping sekian banyak pemuda-pemuda Islam yang masuk ke dalam PTA (Pembela Tanah Air) yang menjadi cikal bakal BKR, TRI dan TNI. Perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Merdeka identik dengan *jihad fi sabilillah*, barang siapa gugur dalam perjuangan itu adalah mati syahid. Itulah sebabnya, ketika musuh-musuh kemerdekaan sudah berada di pelabuhan Surabaya dan beberapa tempat lain, para ulama (22 Oktober 1945) memfatwakan bahwa *fardlu 'ain* hukumnya mempertahankan negara.[21]

Fatwa ulama NU yang mengatakan *fardu 'ain* hukumnya memperjauangkan dan mempertahankan NKRI merupakan fatwa yang memiliki dampak yang sangat luar biasa di dalam mempertahankan Indonesia dari perebutan kembali oleh Belanda dan sekutunya. Oleh karena itu, fatwa tersebut tidak ternilai harganya untuk membangun Indonesia

---

[21] Dikutip dari pendapat Kyai Abdul Muchith Muzadi, pada 6 November 2013.

dimasa yang lalu dan masa yang akan datang. Kalimat "*fardu ain"* berjuang melawan penjajah memang bukan kalimat panjang, tetapi dari kalimat itulah lahir semangat bangsa yang sangat panjang dan bermakna, terutama dalam memperjuangkan kondisi bangsa Indonesia yang lebih bermartabat ditengah pergaulan masyarakat dunia. Dalam masa-masa selanjutnya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno bahkan telah menjadi motor bagi perjuangan masyarakat dunia untuk bebas dan merdeka dari penjajahan yang dilakukan bangsa lain.

Pendirian organisasi NU tentang penolakan terhadap sistem khilafah juga disampaikan oleh Mbah Muchith sebagai berikut:

> "NU menolak gagasan dan sistem Khilafah Islamiyah (Pemerintahan Islam) karena memiliki pendirian dan dasar yang jelas, bukan dipengaruhi kelompok liberal, imperialis atau kapitalis NU memiliki khittah (landasan) sendiri. NU tidak memaksakan syariat Islam dalam sebuah negara, apalagi dengan cara kekerasan. Berbeda dengan kelompok liberal yang menolak syariat agama dalam bentuk apapun. Namun demikian, NU tidak berarti menerima liberalisme dan imperialisme. Penolakannya pun bukan atas pengaruh kelompok Islam fundamentalis. NU sejak awal memang berjuang menegakkan akhlakul karimah dan keadilan sosial yang banyak dilanggar kaum liberal-kapitalis".[22]

---

[22]Lihat dalam

Selain Mbah Muchith, pandangan yang semakna dengannya adalah pandangan yang dikemukakan oleh Kyai Hasin Syafrawi. Merebaknya kelompok Islam garis keras, menurut Kyai Hasin Syafrawi membutuhkan keterlibatan ormas-ormas Islam. Dalam sebuah wawancara, menanggapi merebaknya kelompok HTI di Jember, kyai ini mengatakan:

> Ini bagian kita yang selama ini konsisten bahwa RI adalah final, sebagai bagian dari peninggalan pejuang para ulama terdahulu, harus segera dicarikan solusinya. Walaupun keyakinan mereka sama dengan kita, tapi dalam masalah berbangsa mereka berbeda dengan kita. Mereka kan ikut syaikh Muhammad Abduh (pan islamisme), untuk mengingatkan mereka bukan hanya bagi NU tapi juga bagi pemerintah. Dalam konteks kenegaraan ini bukan hanya urusan NU, tapi juga urusan pemerintah. Pemerintah jangan hanya ngurusi bangunan fisik saja. Bahkan pembinaan yang dilakukan ormas itu perlu dibiayai dari APBD.[23]

Kyai yang cukup akomodatif terhadap pemerintah ini menegaskan bahwa pembinaan yang akan dilakukan oleh ormas-ormas yang ada selama ini seharusnya dibiayai oleh

---

http://jalankhilafah.wordpress.com/category/catatan/page/4/ (diakses 25 Mei 2013)

[23] Wawancara Kyai Muhammad Hasin Syafrawi pada Rabu, 27 Nopember 2013. Beliau adalah Ketua Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama Jember (LTM NU) Jember, mantan pengurus LDNU Jember, Ketua Umum Yayasan Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember, nara sumber dialog agama via udara di RRI Jember, pengurus dewan pendidikan Kabupaten Jember.

pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan beliau menegaskan bahwa masalah pendidikan keagamaan kepada masyarakat bukan hanya tanggung jawab ormas Islam, seperti dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Akan tetapi beban itu juga melekat kepada pemerintah sehingga tidak sebatas kepada pembangunan fisik semata. Namun, perlu pula menyentuh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perdamaian umat.

Kyai Hasin Syafrawi memberikan jawaban untuk tidak tanggung-tanggung melakukan amputasi terhadap organisasi sosial keagamaan dan partai politik yang menolak pancasila sebagai asas negara. Menurutnya, Pancasila dan NKRI sudah menjadi keputusan bersama. Keputusan itu bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Berikut komentarnya:

> Kalau tidak keliru, pemerintah sudah membuat Undang-Undang tentang organisasi masyarakat (ormas). Kita memang harus punya batasan. Kalau tidak begitu, maka kebebasan itu akan menghancurkan kita. Dan pemahaman yang ada selama ini, sema sekali tidak wathoni. Kalau perlu mereka memamg perlu diamputasi dari negeri kita. Kita perlu mewarnai keislaman kita dengan ke-Indonesiaan.[24]

Jika kita amati pandangan Kyai Hasin Syafrawi, tampak sekali bahwa dia adalah aktivis kyai yang konsistensi pan-

---

[24] Wawancara Kyai Muhammad Hasin Syafrawi pada Rabu, 27 Nopember 2013.

dangannya mencerminkan sikap dan pandangan kyai NU, khususnya pandangan tentang bentuk NKRI dan Pancasila sebagai konsensus bersama dalam membangun sebuah nega-ra yang plural. Menurut Kyai Hasin syafrawi, konsensus tersebut penting dilestarikan mengingat Indonesia didirikan tidak hanya oleh umat Islam semata. Indonesia adalah negara yang diperjuangkan dengan keringat dan perjuangan dari masyarakat yang multi keyakinan dan agama. Karenanya, jika kita mensikapi secara jujur, maka keberadaan organisasi NU sebenarnya menjadi soko guru utama dalam mempertahankan hubungan timbal balik antara model keislaman dengan keindonesiaan yang telah lama terjalin dengan baik.

Berkait dengan anggapan bahwa pemerintah tidak adil selama memegang amanat negara baik dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dan penegakan hukum yang tebang pilih, ia menjelaskan:

> Kalau tidak keliru, 80% anggota DPR itu orang Islam. Sementara bagaimana produk hukum kita? Bagaimana dengan kualitas UU nya. Pemuda kita yang sudah dimasuki pemahaman Islam yang kaku, ini perlu kita luruskan, agar tidak merambah kemana-mana. Andaikata UU itu dijiwai oleh Pancasila dan agama, saya kira kita tidak begini.[25]

---

[25] Wawancara Kyai Muhammad Hasin Syafrawi pada Rabu, 27 Nopember 2013.

Ungkapan di atas menunjukkan perasaan kecewa dengan keberadaan anggota DPR yang dalam proses penyusunan undang-undang tidak menjiwai semangat nasionalisme yang utuh. Sehingga produk hukum yang dihasilkannyapun menurutnya tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dari sini, paling menonjol menurutnya adalah masalah penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia.

Selanjutnya, terdapat juga pandangan Kyai Misrawi,[26] pengasuh pondok pesantren At Tayyibah Kecamatan Sumbersari Jember. Dari hasil wawancara dengannya dapat dipaparkan pandangan berikut:

> Aliran radikal di Indonesia? Menurut saya aliran itu tidak akan mampu menghadapi kiai-kiai yang ada di desa. HTI itukan mengajak orang berfikir dengan logika agama. Padahal orang-orang di desa itu kan rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar. Saya kira masyarakat tidak akan sampai berfikir tentang Negara.[27]

Merujuk kepada hasil wawancara dengan kyai yang sering memberikan pengajian di kampung-kampung ini, maka dapat diketahui bahwa yang ada dalam pikiran masyarakat

---

[26] Beliau adalah Wakil Ketua NU Jember, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember, Pengasuh pondok Pesantren At Tayyibah Kecamatan Sumbersari Jember.

[27] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

kampung bukan soal negara atau konstitusi, tetapi yang ada dibenaknya adalah tentang sawah, ladang, tanaman padinya dan lain sebagainya. Meski sederhana, tetapi jawaban Kyai Misrawi dapat mendekati realitas di lapisan masyarakat bawah. Kyai Misrawi dengan demikian dapat menangkap alur pikiran masyarakat desa yang cara berfikirnya cukup sederhana. Namun demikian, usaha yang dilakukan aktivis HTI memasuki ke beberapa lapisan bawah dan melakukan ideologisasi kepada masyarakat, sebagaimana terjadi di Kecamatan Sukowono, Sumbersari, Pakusari, Kaliwates, Ajung Jember dan sekitarnya bukan suatu yang tidak mungkin terjadi apabila HTI dikemudian hari akan mewarnai Jember dan sekitarnya. Terhadap fenomena ini, Kyai Misrawi tetap optimis dengan gerak langkah kyai-kyai NU, sebagaimana ia katakan:

> "Kekuatan kiai NU tidak bisa ditandingi dengan managemen seperti itu. Kalau HTI menggunakan nalar pikirnya, sedang para kiai NU menggunakan hati. Bisa jadi pada saatnya nanti, orang HTI itu akan jadi orang NU. Mi-salkan dulu ada orang Kristen namanya Bapak Jonathan akan mengkristenkan pondok pesantren Talangsari, dengan cara mengawini santrinya, tapi akhirnya dia masuk Islam.[28]

[28] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

Keyakinan sebagaimana tersebut di atas melekat kuat di banyak aktivis NU. Sebagaimana dilakukan pendahulu mereka, seperti Kyai Muhammad Kholil Bangkalan yang dalam kisahnya banyak melakukan pembelajaran melalui mimpi. Sebagai kyai pesantren, Kyai Misrawi menilai sangat signifikan keberadaan kyai-kyai yang ahli berdzikir, karena menurut keyakinannya, kyai-kyai tersebut sejatinya sebagai pagar atau kekuatan NU di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan, walaupun beliau sebagai dosen yang bergelut dengan dunia manajemen, tetapi ia tidak meyakini kekuatan ilmu manajemen dalam melakukan ideologisasi keyakinan keagamaan. Penguatan keyakinan kepada masyarakat yang bertumpu pada kekuatan dzikir lebih ia percayai sebagai daya penguat masyarakat dengan NU. Berikut komentar yang ia kemukakan:

> Saya diajak kiai Abdus Shomad, ke Madura, itu dulu ada namanya Kiai Muhtadi, pondoknya besar, dibangunkan oleh pemerintah daerah (pemda). Tapi walaupun begitu, Kiai Muhtadi cara ngajarnya tidak seperti pada umumnya menggunakan kitab. Santri-santrinya yang tidur dipinggir sawah, tetap diajar beliau melalui mimpi.[29]

Inilah pandangan Kyai Misrawi yang secara akademis sebetulnya tidak dapat ditemukan kerangka epistemologis-

---

[29] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

nya dalam dunia keilmuan. Namun dalam realitas, hal tersebut telah benar-benar diyakini oleh warga NU. Ditanya tentang HTI yang tidak mengakui Pancasila dan menilai toghut orang-orang yang memakai asas tersebut? Kyai Misrawi menjawab:

> Itu pendapat kuno, tidak menghormat bendera. Saya kira khittah NU itu sudah jelas, wong kita tidak bersujud kepada bendera Merah Putih. Khittah NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo itu sudah jelas. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Dan pastinya syariat Islam itu ada di kalimat ESA itu.[30]

Kyai yang ahli manajemen ini menilai bahwa Pancasila pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila dan Islam seakan-akan menjadi berhadap-hadapan, karena kesempitan cara berfikir orang yang menafsirkannya saja. Ketika wawancara pada pagi hari sekitar jam 06:15 di pesantrennya, ia tidak tampak ragu sedikitpun bahwa perjuangan HTI untuk menegakkan Khilafah Islamiyah di Indonesia akan berakhir sia-sia belaka. Sebab, kekuatan kyai-kyai NU sangat mengakar di hati masyarakat Indonesia, khsusnya masyarakat yang ada di wilayah pedesaan dan pinggiran. Terkait dengan pertanyaan tentang: "Mengapa gerakan HTI di Indonesia tidak diamputasi? Ia mengurai beberapa pandangan sebagaimana dipaparkan hasil wawancara berikut:

---

[30] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

> Karena di negeri ini ada istilah HAM. Kalau mau murni liberal juga tidak bisa. Kalau dalam ilmu ekonomi ada istilah ekonomi liberalisme, ekonomi marxisme, ekonomi mazhab Kael Max dan sebagainya. Dan AS pun tidak bebas - sebebasnya. Dalam konteks HAM, mereka kan tidak mengikuti aturan main? Kemaren saya ikut seminar, nah rupanya UU yang sudah di robah beberapa pasalnya itu, sekarang sudah mulai ditinjau kembali. Kemaren itu ada beberapa pembicaraan, bahwa amandemen UU yang dulu sudah banyak dirubah. Sampai program MPR dan DPR yang 4 pilar itu tidak harus dikembangkan lagi. Jember tahun ini akan mendirikan pusat studi Pancasila.[31]

Amputasi atau tidak gerakan HTI yang berkembang di Indonesia, menurutnya bukan masalah pokok yang harus diselesaikan. Namun, yang paling penting menurutnya adalah usaha secara riil dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia dan pemerintah untuk melakukan pembinaan secara memadahi kepada anggotanya. Dengan demikian, bagaimanapun ekstrimnya aliran yang masuk ke Indonesia melalui kran-kran kebebasan informasi, tidak akan menggoyahkan keyakinan beragama dan berbangsa di Indonesia. Kyai ini juga mempunyai pandangan bahwa Pancasila merupakan asas kehidupan berbernegara yang telah final, sebagaimana ucapan berikut: "saya kira pancasila itu sudah final, dan *kul*

---

[31] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

huwallahu ahad tinggal mengembangkan saja.[32] Ketika wawancara ini dilakukan, Kyai Misrawi tampak bersemangat bahwa masa depan Indonesia masih akan stabil selama ulama masih kuat dengan aktifitas dzikirnya. Apalagi umara' atau pemerintah masih mau mendengarkan nasehat dari para ulama, maka bangsa ini menurutnya masih berada dalam kerangka yang dapat dikendalikan. Bahkan, HTI yang dari sisi publikasi, provokasi, dan ideologisasi yang mereka lakukan ke desa-desa, dalam pandangan kyai ini tidak akan mampu menandingi kekuatan kyai-kyai NU yang sudah kuat mengakar di desa-desa.

Selain pandangan kyai-kyai tersebut di atas, ditemukan pula pandangan kyai muda yang aktif mengajar tentang pemikiran Islam di pergruan tinggi Islam, yakni Pujiono Abdul Hamid.[33] Tentang gerakan Khilafah Islamiyah yang dibungkus dalam dakwah HTI, kyai muda ini berkomentar:

> Boleh saja mengaku dakwah Islam. Tapi saya pikir, dakwah Islam itu berlaku untuk semua umat manusia dengan membawa *rahmah lil alamin*. Namun yang terjadi bukan mengajak kepada orang lain dengan baik. Tapi malah akan memaksa kepada alirannya sendiri. Berdakwah kepada orang lain harus dengan kebaikan dan hik-

[32] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

[33] Pengurus harian NU Jember (Bendahara Umum NU Jember) periode 2009/2014. Wawancara, Senin 14 Oktober 2013. Tempat wawancara di STAIN Jember.

mah.[34]

Apa yang menjadi perhatian kiai muda ini adalah tentang kegiatan HTI yang sebetulnya penuh dengan provokasi untuk menyulut perhatian umat Islam. Misalnya, dengan mengenalkan cara-cara dakwah yang cenderung keras tanpa mempertimbangkan situasi masyarakat lokal. Hal ini menurutnya akan melahirkan sikap dan perilaku yang beringas dalam membawa ajaran agama Islam di tengah budaya masyarakat. Ajaran Islam yang diajarkan penuh dengan emosi akan melahirkan wajah Islam yang kaku. Hal semacam ini ini menurut sang kyai berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh wali songo dalam proses dakwah di Jawa. Sebagaimana diketahui, wali songo mendakwakan Islam dengan sangat ramah serta mempertimbangkan berbagai tradisi yang berkembang pada masyarakat lokal. Proses penerimaan Islam yang demikian cepat ini bahkan dicatat pengamat asing sebagai prestasi yang mengagumkan. Islamisasi yang terjadi di tempat lain diperoleh melalui peperangan, sedang proses Islamisasi di Jawa berlangsung dengan cara damai.

Berikut pernyataannya tentang dakwah Islam yang seharusnya dilaksanakan dengan bijaksana:

[34] Wawancara pada hari Senin 14 Oktober 2013, di STAIN Jember.

> Dakwah itu mengajak orang lain untuk ikut mereka, tapi bagaimana kalau dengan kekerasan? Cermatilah Wali Songo yang mengislamkan Tanah Jawa, indah sekali itu. Yang diajak Hindhu - Budha, wah indah sekali itu. Nah yang terjadi sekarang tidak demikian.[35]

B. KEKERASAN DAN TERORISME

Sebagaimana beberapa pandangan ulama NU di atas, dalam uraian ini, kyai-kyai NU di Jember tetap sangat menolak gerakan dakwah apapun namanya yang dilakukan dengan jalan kekerasan dan intimidasi. Berikut penjelasan Kyai Muhammad Idrus Romli ketika diwawancarai:

> Dakwah itu, harus dengan jalan sebagaimana dilakukan oleh para wali songo. Dakwah dengan cara damai itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Kalau HTI dan kawan-lawannya mau melakukan dakwah dengan jalannya sendiri seperti selama ini mereka lakukan, maka menurut saya tidak akan berhasil.[36]

Muhammad Idrus Romli melihat bahwa perjuangan HTI selama ini sangat riskan untuk dilanjutkan sebab perjuangan tersebut sulit dicarikan dasar historisnya yang kuat, khususnya di Indonesia. Berkait dengan terorisme yang semakin meresahkan, ia mengatakan:

---

[35] Ibid.

[36] Wawancara dengan Kyai Muhammad Idrus Romli pada Selasa, 26 Nopember 2013.

> Terorisme itu sudah mengarah kepada anarkisme. Orang-orang yang melakukan tindakan semacam itu sudah salah jalan. Cara berpikinya harus diperbaiki. Mereka termasuk golongan yang tidak paham tentang sejarah pengislaman Indonesia. Yang harus diingat, islamisasi Indonesia itu berbeda dengan islamisasi yang dilakukan oleh negara-negara Islam di Timur-Tengah. Kita mempunyai sejarah sendiri dan negara kita ini termasuk negara Muslim yang menonjol sikap toleransinya. Nah kalau sekarang ini terjadi pengeboman dan kekerasan yang mengatasnamakan agama, itu kan akal-akalalan negara Barat saja.[37]

Berkali-kali kyai idrus menjelaskan kepada peneliti, bahwa islamisasi nusantara oleh wali songo tidak dilakukan melalui kekerasan. Namun, dilakukan melalui cara damai, toleran bahkan akomodatif terhadap tradisi masyarakat yang sudah ada pada waktu itu. Oleh sebab itulah, "mereka yang tidak beragama Islam dengan sangat mudah masuk dalam agama Islam karena keramahan dan ahlak para pembawanya ke tanah Jawa dan Nusantara pada umumnya," kata Kyai Muhammad Idrus Romli. Ia juga menilai ketidaktepatan garis perjuangan yang dilakukan HTI dengan beberapa golongan garis keras dalam menyebarkan agama dan memberikan penyadaran kepada mereka yang sedang lalai menjalankan tugas-tugas agama, sebagaimana hasil wawarara

[37] Wawancara Kyai Muhammad Idrus Romli pada Selasa, 26 Nopember 2013.

berikut:

> Tapi yang jelas, model berdakwah seperti HTI dan beberapa alasan agama yang dipakai oleh para teroris itu sudah tidak benar menurut pandangan agama. Alasan jihad misalkan, tidak benar jika hanya dimaknai untuk perang saja. Sekarang itu jihad perlu melakukan ikhtiyar belajar yang sungguh-sungguh agar tidak di dholimi oleh orang lain karena kebodohannya, atau belajar sungguh-sungguh agar menjadi bangsa yang tidak dibodohi oleh negara-negara lain.[38]

Menurut Muhammad Idrus Romli, “jihad dalam pengertian saat ini tidak lagi bermakna peperangan, apalagi pertempuran fisik”. Ia menambahkan, perjuangan saat ini harus dengan akal dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ia menambahkan, “sekarang itu jihad perlu melakukan ikhtiyar belajar yang sungguh-sungguh dan dalam pengertian seluas-luasnya agar tidak di dholimi oleh orang lain karena kebodohannya, atau belajar sungguh-sungguh agar menjadi bangsa yang tidak dibodohi oleh bangsa-bangsa lain”.

Berkaitan dengan radikalisme yang berkembang dan mengatasnamakan agama, seperti dilakukan oleh Abu Bakar Ba’asyir dan kelompoknya, menurut tanggapan Kyai Hasin Syafrawi adalah sebagai berikut:

---

[38] Wawancara Kyai Muhammad Idrus Romli pada Selasa, 26 Nopember 2013.

> Ini juga kewajiban pemerintah dengan ormas Islam. Mereka banyak mengambil yang keras-keras, padahal di dalam agama banyak juga yang moderat. Ini juga perlu kita ajarkan melalui pendidikan, dan dapat dimasukkan dalam kurikulum diknas dan depag.[39]

Terkait dengan merebaknya gerakan radikalisme agama, Kyai Hasin Syafrawi mengatakan bahwa peran ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah sangat penting dalam membina umat. Kyai ini juga mengatakan, "kita ini terlalu terlena dengan kebesaran NU. Padahal seharusnya organisasi ini perlu turun gunung lagi untuk melakukan pembinaan, pendidikan dan kaderisasi kepada anak-anak muda NU agar mereka tidak diberi tempat di organisasi lain. Lebih lanjut kata kyai, "dalam berdakwah kita jangan mengambil jalan yang keras-kerasnya saja, yang lunak masih banyak diajarkan agama". Kyai Hasin yang merupakan murid langsung KH. Ahmad Siddiq tersebut sangat tegas menyampaikan pendapatnya bahwa NU dan ormas-ormas lain perlu melakukan tindakan yang lebih riil untuk memelihara Indonesia di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ia melanjutkan gagasannya sebagai berikut:

> Kita selama ini terlena dengan kebesaran ormas ini, sehingga kita perlu menggalakkan perhatian kepada umat ini. Kita kurang intens dengan umat, sehingga kita perlu

[39] Wawancara Kyai Muhammad Hasin Syafrawi pada Rabu, 27 Nopember 2013.

> memberikan perhatian lagi kepada mereka. Berapa banyak orang NU yang kehilangan anaknya? Dan katut dengan aliran-aliran itu. Kita lalai dengan anak-anak itu. Kita kurang memperhatikan pendidikan agama anak. Kita terlena dengan prestasi anak dengan melalikan masalah agama tersebut. Anak-anak itu banyak yang lupa kalau orang tuanya moderat. Dan dikampus-kampus mereka ketemu dengan aliran-aliran yang kaku itu.[40]

Perhatian terhadap anak-anak muda NU dan anak-anak muda Muhammadiyah, kata Kyai Hasin harus diperhatikan lebih serius. Sebab, pada hakikatnya yang hendak diinginkan oleh golongan Islam garis keras adalah kelompok anak muda. Kyai Hasin melanjutkan, "…. kita kurang intens dengan umat, sehingga kita perlu memberikan perhatian lagi kepada mereka. Berapa banyak orang NU yang kehilangan anaknya? Dan terlibat dengan aliran-aliran itu…". Pandangan kyai ini sekaligus sebagai otokritik internal kepada ormas-ormas Islam, seperti NU. Sang kyai kemudian berpendapat bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan NU dari tingkat ranting sampai pusat dan begitu juga dengan Muhammadiyah, seperti hasil wawancara ini:

> Kita perlu melangkah bersama dengan ormas-ormas itu. Secara perlahan tapi pasti, mereka masuk ke tempat yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Dibeberapa dae-

---

[40] Wawancara Kyai Muhammad Hasin Syafrawi pada Rabu, 27 Nopember 2013.

> rah banyak ajaran yang dibawa dari luar. Kita NU mengajarkan Islam ala Indonesia, mereka mengangajarkan Islam ala luar.[41]

Selanjutnya, masih menurut Kyai Hasin, model keislaman yang diajarkan ormas-ormas tersebut kurang relevan dengan situasi di Indonesia. Ajaran yang tumbuh dan berkembang dari luar itu sebenarnya turut membuat suasana keruh di Indonesia. Kyai Hasin menambahkan bahwa setelah tahun 1998, ketika keran demokrasi dibuka seluas-luasnya, maka semua informasi masuk dengan sangat bebasnya sehingga berpengaruh dalam melahirkan model-model keislaman puritanis dan cenderung mengedapankan pola Arabisme.

Berbeda dengan pandang Kyai Hasin, Kyai Misrawi lebih lunak dalam menyikapi aliran radikalisme, berikut komentarnya:

> Selama kiai-kiai yang menggas Pancasila itu masih ada. Kita tidak perlu khawatir. Pendidikan Pancasila harus masuk sekolah-sekolah lagi. Calon-calon anggota DPR harus tahu Pancasila, dan DPR kita sekarang banyak yang tidak tahu Pancasila. Berangkat dari ada istiadat di Indonesia, Mesir yang unggul di tingkat dunia, ya hancur, Irak dan Iran ya begitu, lalu mana yang mau di-

---

[41] Wawancara Kyai Muhammad Hasin Syafrawi pada Rabu, 27 Nopember 2013.

tiru.[42]

Demikian isi wawancara dengan Kyai Misrawi. Sang kiai yang memiliki kemampuan panca indra ke enam ini menilai bahwa Indonesia hingga sekarang masih dijaga oleh kyai-kyai NU yang ikut terlibat dalam memperjuangkan NKRI pada tahun 1945. Entah dengan cara apa, yang jelas Kyai Misrawi mengatakan bahwa para kyai tersebut masih menjaga Indonesia. Sambil bersantai di ruang tamunya, kyai yang memiliki santri berlatar belakang mahasiswa ini mengatakan kepada peneliti tentang tidak perlu menghawatirkan masuknya HTI di perguruan tinggi. Namun, yang pasti para mahasiswa perlu mendapatkan informasi seimbang agar tidak kebablasan. Dalam konteks ini ia mengatakan:

> Berkait dengan HTI dan radikalisme yang masuk perguruan tinggi itu hampir sama seperti wahabi di Mekkah. Orang-orang yang datang ke Mekkah itu kan orang-orang di desa dan mereka tidak bisa baca. Kalau kiai-kiai bilang dikir, ya mereka akan dikir. Masyarakat kita itu tidak tahu trias politika dan lain sebagainya. Buktinya di Mekkah itu mereka hanya membawa bukunya, tetapi tidak dibaca, *yaa gun egibeh maloloh* (ya cuman di bawa saja).[43]

---

[42] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

[43] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

Dari sisi perawakan, Kyai Misrawi termasuk kyai yang penampilannya “nyentrik” jika dibandingkan dengan kyai-kyai lainnya.Walaupun tercatat sebagai dosen mata kuliah ekonomi, tetapi topik pembicaraannya selalu dikait-kaitkan dengan dunia kewalian yang banyak orang tidak memahaminya. Namun, itulah salah satu kelebihannya Kyai Misrawi ini. Pendapatnya tentang Islam Aswaja yang mengedepankan cara hidup seimbang sebagai berikut:

> Adakah workshop tahlilan kan gak ada ….? Biasanya orang wali itu tidak usah diajari, dan biasanya mereka akan datang sendiri, misalkan kiai Mukhtar di Jember, beliau jalan kemana-mana hanya pakai bakiak. Ia tidak ngomong apalagi banyak ngomongKalau orang makan sama kiai, biasanya itu sudah dipukul hatinya, dipukul dalam artian memperkuat tauhid masyarakat itu. Misalkan nasi yang sebutir itu, orang banyak tidak tahu tentang nilai barokahnya. Selama ada kiai-kiai ASWAJA itu masih sulit merubah Indonesia. Kalau pesantren di kita ini sudah habis, maka kita akan tinggal menunggu masa hancurnya saja. Syiria sudah hancur, Timur Tengah sudah berantakan. Syiria itu akan belajar Islam ke kita.[44]

Jika dibandingkan dengan kyai-kyai yang lain, Kyai Misrawi termasuk kyai yang nyentrik dalam cara pandangnya tentang mebaknya gerakan terorisme. Pernah ia mengatakan, “...dulu kiai Muhyidin Abdusshomad bertanya kepada

---

[44] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

Saya, gimana itu Wie Gus Dur itu kok masuk Gereja? Tapi saya bilang tidak apa-apa kyai.[45] Demikian adalah salah satu potret pemikiran Kyai Misrawi yang jika tidak di dalami akan kelihatan agak lain jika dibandingkan dengan kyai-kyai pesantren lainnya. Sebuah kewajaran karena Kyai Misrawi termasuk kyai sekaligus dosen yang memiliki bacaan dan pergaulan luas.

Berkait dengan aksi kekerasan yang berkembang di masyarakat, Pujiono, kiai NU muda Jember mengatakan bahwa kekerasan itu motifnya berbeda-beda. Kyai yang sehari-hari dikenal sebagai dosen di PTAI ini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kekerasan. Apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan agama, seperti ungkapannya:

> Kekerasan itu motifnya berbeda-beda....Kekerasan bisa terjadi apabila masyarakat kurang komunikatif dengan lingkungan sekitarnya. Informasi yang saya terima, terkait dengan kekerasan yang dialami warga Ahmadiyah adalah karena kurang komunikatifnya mereka dengan lingkungan sekitarnya. Mereka sudah dingatkan agar tidak membuat sesuatu yang melahirkan kegaduhan di masyarakat. Namun, karena peringatan itu tidak diindahkan, maka terjadilah kekerasan yang mereka alami. Meski demikian, saya tidak setuju penyelesaian masalah dengan kekerasan karena hal itu dilarang da-

[45] Wawancara dengan Kyai Misrawi pada hari Kamis, 28 Nopember 2013.

lam agama.[46]

Kyai muda ini juga menekankan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama. Namun, bagi yang memiliki ajaran berbeda harus memahami kondisi masyarakat sekitar, agar tidak dengan mudah melahirkan aksi-aksi kekerasan. Kasus kekerasan yang menimpa golongan Ahmadiyah beberapa waktu yang lalu termasuk yang sudah disinggung di atas, merupakan efek dari tidak lancarnya komunikasi antara pembawa ajaran dengan masyarakat sekitar sehingga meresahkan warga sekitar dan akhirnya melahirkan aksi kekerasan. Dalam konteks berdakwah, beliau menyitir hadist nabi sebagai berikut:

> *Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadih*…..atau *ud'uuu ila sabilirabbika bilhikmah*…..keterangan itu jangan ditelan mentah-mentah. *Amar makruf nahi mungkar* itu jangan sampai membuat kerusakan dan kekerasan. Amar makruf itu semestinya disampaikan dengan baik. Kata Al Ghazali, kalau mau menangkap ikan, jangan sampai membuat airnya keruh. Jangan *amar makruf bil mungkar*, itu masalah, gak benar itu. Menyampaikan kebaikan perlu juga dengan kebaikan. Biar agama tidak dipahami hanya sepotong-sepotong. Bagaimana mengajak orang kepada kebaikan kalau menyinggung perasaan orang lain dan menyakitinya. Janganlah ayat dan hadis dimaknai sepotong saja.[47]

[4646] Wawancara pada hari Senin 14 Oktober 2013, di STAIN Jember.

[47] Wawancara pada hari Senin 14 Oktober 2013, di STAIN Jember.

Dari penjelasan di atas, kyai muda ini jelas aksi menolak kekerasan dalam berdakwah, dalam berbagai bentuk dan motifnya. Menurutnya, tidak dibenarkan, karena hanya akan memperkeruh suasana kebatinan dan tidak melahirkan ketenangan dalam beragama. Terkait dengan terorisme dan aliran-aliran yang merupakan metamorfosis dari aliran tersebut, kyai yang juga doktor ustad yang lulusan IAIN Surabaya ini menguraikan:

> Orang seperti itu perlu memahami Islam, masak orang yang sudah masuk Islam masih diperangi? Masak orang hanya karena tahlilan mau diperangi, jihad dan dakwahnya dimana terus? Ini sajakan sudah masalah. Perlulah memahami strategi dakwah seperti wali songo itu. Saya setuju dengan dialog. Saya mengamati dialog para kiai dan tokoh lain. Saya pernah berdialog dengan tokoh-tokoh Hindu di Bali. Sebelum ada ledakan banyak yang masuk Islam, Islam itu menjadi daya tarik sendiri bagi kalangan mereka. Tetapi setelah itu, sulit sekali. Bahkan untuk berkomunikasi saja, sulitnya minta ampun.[48]

Kekerasan dalam pandangan kyai ini tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, akan melahirkan masalah-masalah baru. “Orang beragama itu dengan hati”, kata Kyai Pujiono. Jadi, sulit memaksakan keyakinan agama bagi orang lain. Ia mengakhiri pendapatnya sebagai berikut:

---

[48] Wawancara pada hari Senin 14 Oktober 2013, di STAIN Jember.

> Indonesia menyikapi masalah semacam ini harus dari perspektif pluralisme. Badan intelejen harus mampu masuk pada aktor-aktor intelektual serta para penyandang dananya. Yaa... kalau persoalan pembubaran ormas, itu gampang saja. Masalah setuju dan tidak itu masalah gampang. Tapi kalau ormas itu setelah dibubarkan muncul lagi dengan nama yang lain, wah itu masalah lagi. Tapi yang jelas, dalam hal ini, Negara harus benrtindak tegas, biar tidak merugikan agama Islam. Kekerasan yang mengatasnamakan Islam, jelas merugikan agama Islam dan umat Islam. Nah, Negara dalam konteks ini, harus bertindak tegas. Biar tidak mencoreng agama atau ormas tertentu.[49]

Secara akademik, pandangan Kyai Pujiono merupakan pandangan yang tidak semua orang mampu melakukannya. Hanya masyarakat yang sadar tentang kerukunan dan perdamaian semata yang dapat menerima pandangan tersebut. Sebab jika berhadapan dengan masayarakat kecil, biasanya dalam menyikapi perbedaan sering menggunakan perspektifnya sendiri. Tidak jarang perspektif yang mereka gunakan cenderung keras dan menguntungkan kelompoknya sendiri, tidak bisa menerima pandangan lain di luar kelompoknya. Jika demikian, maka wajah Islam yang ramah akan tercoreng. Islam yang dibawa Nabi Muhammad dan tumbuh berkembang karena sikap ramah Nabi dalam berdakwah akan terkotori oleh perangai/watak yang kasar dan bengis. Sikap

[49] Wawancara pada hari Senin 14 Oktober 2013, di STAIN Jember.

ini jelas-jelas bertentangan dengan tuntutan al-Qur'an yang mengajarkan prinsip-prinsip berdakwah dengan cara hikmah, mau'idhah hasanah dan mujadalah.

C. MENIMBANG SISTEM KHILAFAH DAN MERESPON TERORISME

Di Indonesia, ide khilafah bukanlah gagasan baru. Untuk merespon keruntuhan terakhirnya pada Maret 1924, pernah dibentuk Komite Khilafah di Surabaya pada 4 Oktober 1924. Komite ini bertujuan menghadiri undangan kongres khilafah di Kairo. Kyai Wahab Hasbullah dalam komite ini kemudian membentuk Komite Hijaz. Komite ini di kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Nadltul Ulama (NU) pada 31 Januri 1924.[50] Dalam perkembangan Indonesia pascareformasi, gagasan penegakkan khilafah marak kembali, terutama digelindingkan oleh kelangan Hizbut Tahrir Indonesia.

Istilah khilafah mengacu kepada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30 tentang penciptaan manusia yang disebut khalifah, wakil Tuhan di bumi. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa tugas khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi dan bukan menegakkan khilafah, yakni kekhilafahan sebagai lembaga politik yang bermula pada

---

[50]Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980).

masa pasca Nabi Muhammad saw yang dikenal *al-khulafa al-rasyidun* berturut-turut Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ciri utama dalam cara mereka memimpin terletak pada keunggulan kualitas pribadi dibanding dengan yang lain. Ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan dinasti Islam setelahnya, terutama pada proses terpilih sebagai pemimpin. Dinasti-dinasti Islam seperti Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Ustmaniyah tidak dapat disebut sebagai kekhalifahan Islam karena suksesi kepemimpinan yang terjadi pada dinasti-dinasti tersebut berdasar kepada tali darah. Semua entitas politik pasca al-Khulafa al-Rasyidun adalah kerajaan dan kesultanan, bukan khalifah. Jadi sejak berakhirnya masa kepemimpinan Ali bin Thalib, maka berakhir pula masa kekhalifahan Islam. Artinya, jika pada saat sekarang muncul gagasan untuk menegakkan khalifah oleh sebagian kelompok Islam di Indonesia, maka sebenarnya gagasan itu lebih tepat dikatakan sebagai romantisme sejarah. Pernyataan tersebut pernah dikemukakan Azyumardi Azra.[51]

Temuan-temuan dari hasil wawancara dengan beberapa kyai NU Jember sebagaimana tersebut di atas secara teoritik senada dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Azyumardi. Di kemukakan pula oleh Azyumardi bahwa realitas

---

[51] Lihat kolom opini yang ditulis Azyumardi Azra, "Relevansi Khilafah di Indonesia", dalam Kompas, Agustus 2007.

politik di Indonesia sangat tidak memungkinkan bagi kelompok Islam untuk memaksakan penegakkan Khilafah. Kompromi yang dapat mereka lakukan adalah membentuk sayap perjuangan politik seperti mendirikan Hizbut Tahrir Indonesia, sebagaimana pernah dilakukan oleh Abu A'la al-Mawdudi dengan Jama'ati Islami. Sejarah telah mencatat bahwa dalam perjuangannya, al-Mawdudi akhirnya menyerah kepada realitas negara-bangsa (*nation-state*). Ia menerima kehadiran Pakistan sebagai negara setelah berpisah dengan Anak Benua India pada 1947 untuk kemudian mendirikan Jama'ati Islam.

Dari hasil penelitian ini, maka gagasan khilafah yang menyerukan pembentukan kekuasaan politik tunggal bagi umat Islam di muka bumi nampaknya perlu dipertanyakan kelayakannya. Sebab, jika kelompok umat Islam jujur, kesatuan kekuasaan politik seperti itu akan sulit dicapai. Bahkan, sebelum kekuasaan politik khalifah Ali bin Abi Thalib berakhir pun, sudah banyak terjadi pertikaian politik. Kesatuan kekuasaan politik hanya terjadi secara sempurna ketika kepemimpinan Islam berada pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sejak paruh kedua kepemimpinan Ustman bin Affah dan kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib umat Islam mulai mengalami perpecahan. Jadi, sejarah telah memberi pelajaran berharga bahwa kekuasaan politik tunggal lebih merupakan imajinasi atau idealisasi dari sejarah Is-

lam.

Adapun tentang radikalisme agama yang sekarang berkembangkan dalam aksi-aksi yang dimotori oleh kelompok terorisme bukanlah fenomena baru dalam Islam. Sebelum muncul fundamentalisme Islam kontemporer, terdapat gerakan yang mungkin disebut sebagai prototipe gerakan radikalisme, yang belakangan bermetaformosa menjadi aksi kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama lebih dikarenakan oleh kurangnya sikap toleran dalam menghadapi perbedaan paham. Pola penanganan terhadap kasus-kasus tersebut sebelumnya dikenal lebih menekankan pendekatan kekuasaan, terutama ketika bangsa ini berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. Pengalaman Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru yang militeristik, terbukti gagal meredam fenomena kekerasan yang tumbuh berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, sejak runtuhnya rezim Orde baru, tepatnya ketika kran demokrasi dibuka secara lebar, tindak kekerasan atas nama agama dan kelompok-kelompok sektarian semakin menjadi fenomena yang tumbuh subur di Indonesia. Terhadap fenomena tersebut, media pernah mencatat pandangan pengamat bahwa bangsa Indonesia seakan-akan kehilangan jati dirinya, sebagai bangsa yang menjunjung etika dan sopan santun adat ketimuran.[52]

---

[52]Kompas. Com pada 23 Desember 2012 memuat komentar Direktur

Selain aksi kekerasan, transisi demokrasi juga ditandai oleh ledakan partisipasi masyarakat melalui retorika Islamisme yang memunculkan Islam politik di Indonesia.[53] Geliat arus Islam politik yang terjadi demikian cepat berkembang seolah menafikan model perjuangan Islam kultural yang tumbuh sebelumnya. Bahkan, retorika Islamisme cenderung agresif dan mengesankan sebagai sebuah tafsir tunggal, termasuk di dalamnya menyangkut tentang hubungan antara agama (baca; Islam) dan demokrasi. Masalah kontemporer yang lahir dari relasi antara Islam dan demokrasi ini adalah munculnya gerakan radikalisme agama yang mempunyai watak keras, ekslusif, dan ekstrim. Watak inilah yang disinyalir sebagai faktor pendorong lahirnya aksi teroris yang akhir-akhir ini marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.[54]

Yayasan Deni JA, Novriantoni Kahar, dalam jumpa pers di Kantor Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Jakarta. Lihat *http://internasional.kompas.com/read/2012/12/23/15154962/Lima.Kasus.Diskriminasi.Terburuk.Pascareformasi* (Diakses 1 November 2013).

[53]Lihat Ahidul Asror, "Radical Islamic Movement in the Era of Democratic Transition in Indonesia", dalam Imam Subchi et.al, *Mozaik Pemikiran Islam Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pendis dan Diktis Kementerian Agama RI, 2011), 247.

[54]Tentang kebangkitan Islam, John L. Esposito mengatakan bahwa kebangkitan Islam adalah bagian dari pencarian bentuk, identitas dari komunitas Islam. Radikalisme Islam menurut Esposito merupakan bentuk *civil Islam* yang melakukan perlawanan terhadap perlakukan tidak adil dari sebuah rezim. Jika salah mengorganisir, maka gerakan ini di samping menjadi inspirasi pembebasan juga bisa menjadi sumber ekstrimisme. John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 73.

BAB 4

CATATAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar temuan dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

Pertama, kyai NU Jember menolak sistem khilafah yang hendak ditegakkan oleh sebagian kelompok Islam di Indonesia. Bagi mereka, penegakan sistem khilafah bukan saja merupakan sesuatu yang ahistoris, tetapi juga tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan demokrasi yang memposisikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Alasan mereka menolak sistem khilafah didasarkan kepada argumentasi bahwa sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila adalah konsensus bangsa yang bersifat final. Upaya lain di luar konsensus yang bermaksud meru-

bah sistem tersebut dianggap akan mencederai semangat kemerdekaan yang sudah lama tumbuh berkembang dan diproklamirkan pada tahun 1945. Selain berdasar karena faktor sejarah, kiai NU Jember didalam membangun argumentasi menolak penegakan sistem khilafah juga di dasarkan kepada ajaran agama yang mereka pahami. Mereka berpandangan bahwa apa yang terpenting dalam kepemimpinan bukanlah terletak kepada kesatuan politik di bawah kendali seorang pemimpin/khalifah, tetapi yang wajib diperjuangkan dalam kepemimpinan politik adalah terpeliharanya persudaraan sesama muslim (ukhuwah islamiyah).

Kedua, kyai NU Jember menolak setiap bentuk radikalisasi agama yang dilakukan oleh kalangan teroris dalam mendakwahkan Islam. Ajaran Islam yang didakwahkan secara radikal dengan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat lokal menurut pandangan kyai NU Jember akan melahirkan wajah Islam yang kaku dan ahistoris. Pola dakwah yang dikembangkan kalangan teroris dengan menempuh jalan kekerasan dinilai kyai NU Jember sebagai ketidaktepatan sebuah garis perjuangan. Mereka kemudian menawarkan model dakwah yang pernah dilakukan wali songo di Jawa karena keberhasilan menyebarluaskan Islam di wilayah Nusantara dengan sikap yang ramah, penuh toleransi, dan sangat mempertimbangkan berbagai tradisi masyarakat lokal.

B. REKOMENDASI

Bagi organisasi sosial keagamaan, perlu melakukan ikhtiyar lebih mendalam dalam melakukan pembinaan anggotanya karena munculnya gerakan Islam radikal salah satunya disebabkan oleh karena kurang perhatiannya mereka terhadap anggotanya. Perhatian itu dapat dikakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dialog dan jalinan silaturrahim dengan berbagai pihak. Bagi pemerintah, perlu memberikan bantuan baik berupa sarana dan prasarana kepada organisasi sosial keagamaan yang terus berjuang mengajarkan sikap moderatisme Islam melalui program pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Bagi para peneliti/ akademisi, kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini tidak lepas dari berbagai kelemahan. Kelemahan itu misalnya terjadi pada saat peneliti melakukan reduksi dan pengorganisasian data hasil wawancara dengan narasumber. Sangat mungkin juga terjadi kelemahan disebabkan terlalu cepatnya peneliti mengambil kesimpulan. Demikian pula, kesimpulan penelitian ini mungkin kurang dapat mempresentasikan sikap dan pandangan kyai NU Jember karena terbatasnya narasumber yang berhasil ditemui oleh peneliti.

Di atas semua keterbatasan sebagaimana tersebut, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi, yakni perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan berbagai narasumber dalam skala lebih luas. Penelitian tersebut tidak

hanya menitikberatkan kepada sikap dan pandangan kyai tentang khilafah dan terorisme semata, tetapi menyangkut tentang wacana Islam kebangsaan kontemorer lain yang mempunyai implikasi serius dalam ranah kehidupan masyarakat beragama dan berbangsa. Dengan kata lain, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang sikap dan pandangan kyai NU dalam skala lebih luas dan mendalam tentang berbagai wacana Islam kebangsaan kontemporer sehingga diperoleh pengetahuan yang lebih baru dan sistematis, yang dapat diimplementasikan bagi kepentingan masyarakat luas.

B

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amin, Ainur Rofiq.2012. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia.*Yogyakarta: LKIS.

Abdalla, Ulil Abshar.2003.“Keragaman dalam Pandangan Islam,” dalam *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas.* Jakarta: Erlangga.

Abdalla, Ulil Abshar.2005. *Menjadi Muslim Liberal.*Jakarta: Nalar.

Abegebril, Agus Maftuh. 2007. “Mazhab Islam Kosmopolitan Gus Dur”, dalam Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan.* Jakarta: The Wahid Institute.

Azra, Azyumardi.“Relevansi Khilafah di Indonesia”, dalam Kompas, Agustus 2007.

Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan.* Jakarta: The Wahid Institute.

Anam, Choirul . 2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU.* Cet. III. Solo: Duta *Aksara* Mulia.

Asror, Ahidul. 2011. "Radical Islamic Movement in the Era of Democratic *Transition* in Indonesia", dalam Imam Subchi et.al, *Mozaik Pemikiran Islam Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia.* Jakarta: Dirjen Pendis dan Diktis Kementerian Agama RI.

Asmani, Jamal Ma'mur. 2007.*Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan Implementasi.*Surabaya: Khalista.

Assyaukani, Luthfi. "Pemikiran" dalam "Pemetaan dan Diskursus Pemikiran Islam Timur Tengah Era Modern" diakses dari *http://mahir-al-hujjah.blogspot.com/2008/07/-konsep-umum-pemikiran-dan-pemikiran.html*. (Mei 2013)

Azra, Azyumaardi. "Relevansi Khilafah di Indonesia", Harian Kompas, Agustus 2007.

________1996. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme.* Jakarta: Paramadina.

Darwis, Ellyasa KH.(ed). 1994. *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil.*Yogyakarta: LKiS, dan Pustaka Pelajar.

Esposito, John L. 1992. *The Islamic Threat: Myth or Reality?* Oxford: Oxford University Press.

Faisal, Sanapiah.1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi.* Malang: YA3, 1990.

Feillard, Andree .1994. "Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, Legitimasi, dan Pembaharuan", dalam Ellyasa KH. Dharwis (ed). 1994. *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*.Yogyakarta: LKiS, dan Pustaka Pelajar.

Hamin, Toha.2004. "Haruskah Negara-negara Islam Dipimpin Lagi Oleh Seorang Khalifah, Bukan Presiden" dalam *Islam dan NU Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer.* Surabaya: Diantama.

Hikam, Muhammad AS. 1997. "Khittah dan Penguatan Civil Society di Indonesia: Sebuah Kajian Historis Struktural atas NU Sejak 1984", dalam dalam Greg Fealy dan Greg Barton, 1997. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara.* Yogyakarta: LKiS.

Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial.* Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

Misrawi, Zuhairi. 2004. *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian.* Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Misrawi, Zuhairi. 2010. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas.

Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama.* Yogyakarta: LKiS.

Mulia, Musda. "Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta" dalam Majalah Tabligh Muhammadiyah (Mei 2008).

Mulia, Musda. *Counter Legal Draft*, Kompilasi Hukum Islam, Litbang *Departemen* Agama.

Munir, Syamsul Arifin.2009. *Percikan Pemikiran Para Kyai.* Yogyakarta: LKiS.

Muzadi, Muchith. "Soal NII, Pemerintah Masih Ragu" diakses dari *http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,32403-lang,id-c,warta-t,Mbah+Muchit++Soal+NII+-+Pemerintah+Masih+Ragu-.phpx* (Mei 2013).

Muzadi, Muchith. "Teroris Bukan Cuma Noordin" diakses dari *http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,18563-lang,id-c,warta-t,Mbah+Muchit++Teroris+Bukan+Cuma+Noordin-.phpx* (Mei 2013).

Muzadi, Muchith. 1994. *NU dan Fiqih Kontekstual.*Yogyakarta: LKPSM NU.

Muktamar Semarang 1979 Hingga Muktamar Situbondo 1984", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.). 1997. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara.*Yogyakarta: LKiS.

Nakamura, Mitsuo. 1997 ."Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 1980-an: Dari Muktamar Semarang 1979 Hingga Muktamar Situbondo 1984" dalam Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara.*Yogyakarta:

LKiS.

Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES

Oetomo, Dede. 1993. "Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial," dalam Makalah Seminar Balai Kajian Sumber Daya Manusia, Fisip Unair pada 7-9 Oktober 1993

Punch, Keith F. 1998. *Introduction To Social Research: Qualitatve & Quantitative Approaches.* London: Sage Publication.

Rahman, Zaini. 2006. "Terorisme dan Ruang Artikulasi Politik", dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi.*Jakarta: The Circle for Contemporary Political Studies.

Romli, Muhammad Idrus. 2012. *Memperjuangkan Khilafah, Wajibkah?* Surabaya: Majalah AULA NU Jawa Timur, Edisi Desember.

Romli, Muhammad Idrus. *Cara Berdebat Dengan HTI,* Bina Aswaja Pasuruan Jawa Timur.

Said Ali, As'ad.2009. *Negara Pancasila; Jalan Kemaslahatan Berbangsa.* Jakarta: LP3ES.

Sihbudi, Riza. 2006. "Dimensi Internasional Terorisme", dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi.*Jakarta: The Circle for Contemporary Political Studies.

Siradj, Said Aqil Siradj.1999. *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri.*Jakarta: Pustaka Ciganjur.

Suprayogo, Imam.2007. *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai.* Malang: UIN Press.

Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik.*Jakarta: Grasindo

Sutarto, Ayu. *2008. Menjadi NU Menjadi Indonesia; Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi.* Surabaya: Khalista & Kompyawisda Jatim.

Ummatin, Khoiro.2002. *Perilaku Politik Kiai.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan.*Jakarta: The Wahid Institute.

Wingjosoebroto, Soetandyo. 1993. “Grounded Research”, Makalah Seminar Balai Kajian Sumber *Daya* Manusia, Fisip Unair pada 7-9 Oktober 1993.

Zuhri, Achmad Muhibbin. 2010. *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah.*Surabaya: Khalista dan LTN PBNU.

B

TENTANG PENULIS

AHIDUL ASROR, lahir di Gresik, Jawa Timur pada 6 Juni 1974. Menamatkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1987 dan Madrasah Tsanawiyah tahun 1990 di kota Gresik. Peneliti melanjutkan pendidikan di MAN Tambakberas Jombang dan tamat pada tahun 1993. Gelar Sarjana S-1 diperoleh dari Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1998. Adapun gelar Magister Agama dan Doktor bidang Studi Islam diraih masing-masing pada tahun 2000 dan 2006.

Selama menjadi mahasiswa aktif di Lembaga Senat Mahasiswa, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, Ketua Pusat Kajian Islam dan Sosial (PKIS) Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Sekarang tercatat sebagai salah satu dosen tetap di Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.

Pengalaman menjabat di STAIN Jember yaitu sebagai Sek-

retaris Jurusan Dakwah, dan kini menjabat sebagai Ketua Jurusan dakwah STAIN Jember.